



LAPORAN
CAPAIAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim

2023

RENCANA KINERJA

Rencana Strategis
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Capaian Kinerja Organisasi
Analisis Capaian Kinerja
Analisa Keuangan dan Penggunaan
Sumberdaya Kepegawaian

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) Triwulan IV Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal Bulan Februari 2023. Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

LAKIP ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Juli s.d. 30 September 2023. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim hingga Triwulan IV Tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochammad Firman Hidayat'. The signature is stylized and fluid.

Mochammad Firman Hidayat



DAFTAR ISI

04	Bab I Pendahuluan
04	1.1. Latar Belakang
05	1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
09	Bab II Rencana Kerja
09	2.1. Sasaran Strategis (SS)
11	2.2. Indikator dan Target Kinerja
11	<i>Indikator Kinerja dan Target Kinerja</i>
11	<i>Penghitungan Capaian Kinerja</i>
14	<i>Kegiatan dan Anggaran</i>
17	Bab III Akuntabilitas Kinerja
17	3.1. Capaian Kinerja Organisasi
103	3.2. Realisasi Anggaran
106	Bab IV Penutup

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim.

Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya maritim yang mandiri dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju dapat diwujudkan melalui kebijakan berikut :



Kinerja Deputy Sumber Daya Maritim pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 98,29%. Dari 6 IKU, jumlah IKU yang mencapai target adalah sebanyak 6 IKU, sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 2 IKU. Kendala dalam proses penyusunan regulasi dan perubahan beberapa kebijakan telah mempengaruhi pencapaian target kinerja.

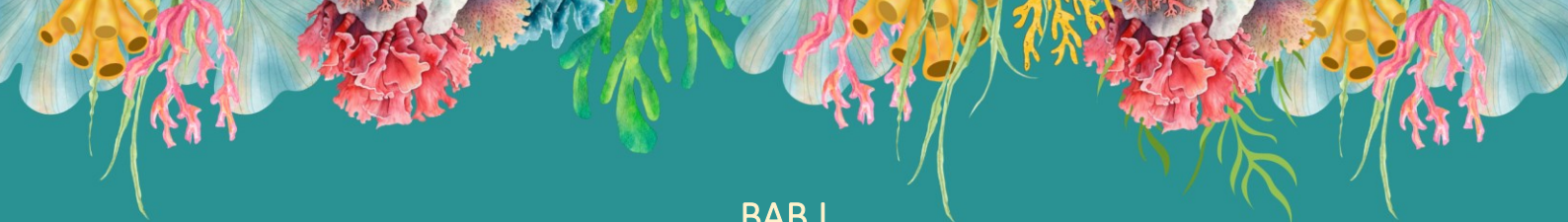
Perihal kerangka pendanaan. Secara garis besar Anggaran Deputi Bidang Sumber Daya Maritim termasuk dalam satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Anggaran tersebut mengacu pada kebijakan penganggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan sesuai periode perencanaan dan penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan.

Tabel 1 Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.300.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.300.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.000.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.500.000.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.500.000.000,-

Berikut merupakan tabel rincian realisasi anggaran Deputi Bidang Sumber Daya Maritim tahun 2023

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	15,859,820,000	15,852,885,092	6,934,908	99.96
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Non ABT)	14,499,850,000	14,494,087,808	5,762,192	99.96
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	2,050,000,000	2,049,858,216	141,784	99.99
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,140,000,000	2,139,795,188	204,812	99.99
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	2,140,000,000	2,137,387,655	2,612,345	99.88
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	1,900,000,000	1,897,870,720	2,129,280	99.89
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1,900,000,000	1,899,800,339	199,661	99.99
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Sumber Daya Maritim	2,319,850,000	2,319,773,554	76,446	100.00
ABT SAWIT	1,359,970,000	1,358,797,284	1,172,716	99.91
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2,050,000,000	2,049,602,136	397,864	99.98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

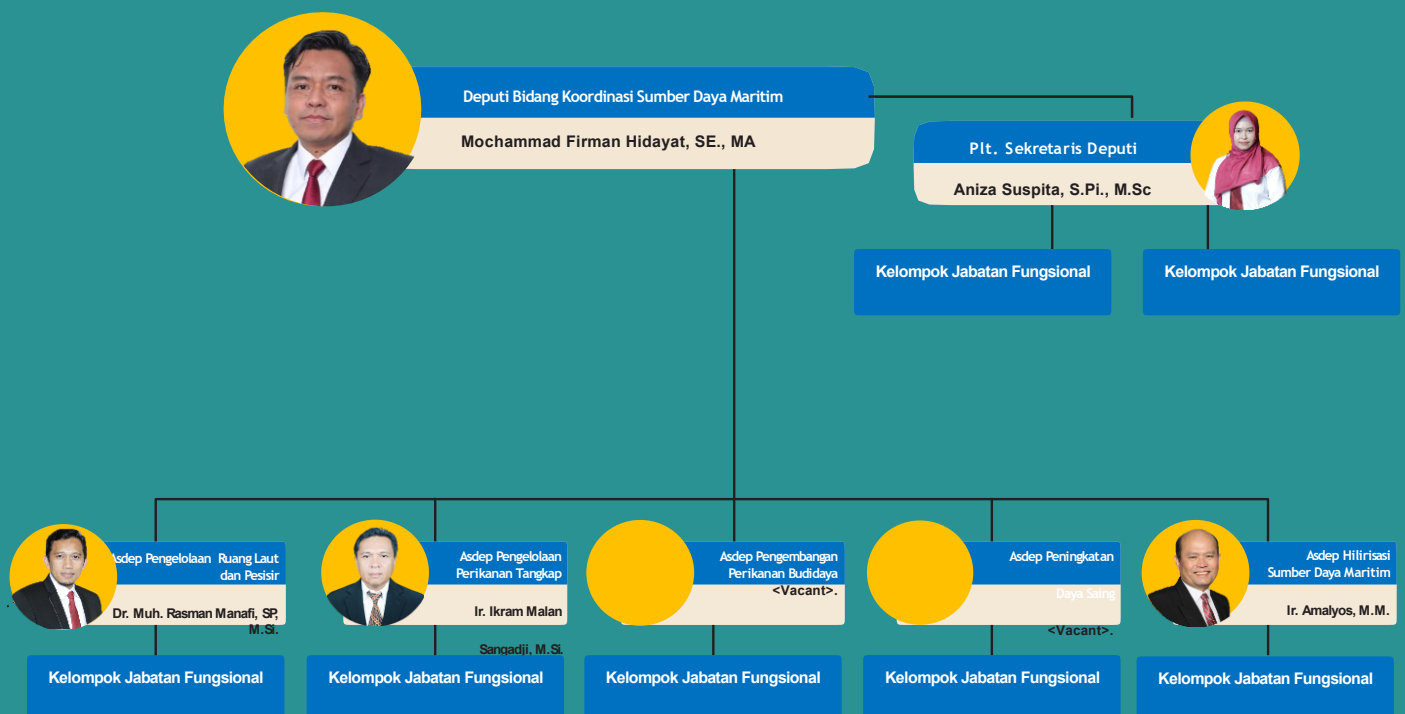
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada setiap triwulan dengan triwulan 1-4 didapatkan output antara dan pada triwulan 4 output dan outcome akhir dihasilkan. sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dan serta pelaporan output antara dalam mendukung capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi SD Maritim pada TA 2023.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta 2 pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputy SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputy dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan.



Gambar 1 Struktur Organisasi



Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan 3 sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.



Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.


Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- 
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.


Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;
- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;

- 
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
 - d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
 - a. e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
 - e. koordinasi penyusunan laporan; dan
 - f. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekretariat Deputi terdiri atas:
 - Bagian Program;
 - Bagian Administrasi Umum; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan ini secara umum menginformasikan capaian Deputi Bidang Sumber Daya Maritim selama periode triwulan IV tahun 2023. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja capaian Deputi Bidang Sumber Daya Maritim selama periode triwulan IV tahun 2023. adalah sebagai berikut.

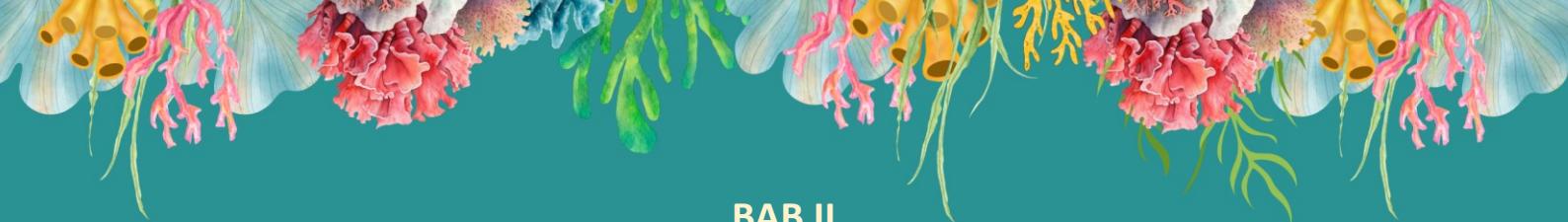
Bab I Pendahuluan; Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sistematika penyajian.

Bab II Rencana Kinerja; Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2023, pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1) Realisasi Kinerja
- 2) Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup; Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindaklanjut dimasa depan
Lampiran; berisikan dokumen yang mendukung informasi terkait Bab sebelumnya



BAB II RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective), perspektif pengguna (customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai
- 3) Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

4) Sasaran strategis Deputy: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2 Peta Strategis Deputy SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputy SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2 Sasaran Strategis Deputy Sumber Daya Maritim Tahun 2023

SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3 SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	1	Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	90%
		2	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien	5	Nilai PMPRB Pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	90%
		6	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	76

perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2023 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2023. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2023.

Formula:

$$\frac{(\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023})}{(\text{Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023} + \text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023})} \times \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2023}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2023}} \times 100\%$$

2

2. IKU.2 Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut adalah

1. Laut Sebagai Sumber Pangan
2. Laut Untuk Perikanan Skala Kecil
3. Laut Sebagai Sumber Produk Alam
4. Laut Sebagai Penyimpan Karbon
5. Laut Sebagai Perlindungan Pesisir
6. Laut Sebagai Sumber Matapencarian dan Ekonomi
7. Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi
8. Laut Sebagai Tempat Perlindungan dan Tempat Ikonis
9. Laut Sebagai Perairan Yang Bersih
10. Keanekaragaman Hayati

Formula:

$$\text{IKLI Agregat} = \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 1} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 2} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 3} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 4} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 5} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 6} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 7} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 8} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 9} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 10}$$

3. IKU.3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti

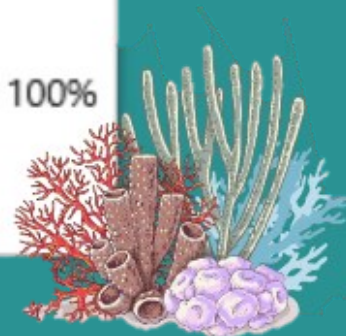
Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rekomendasi kebijakan

Formula:

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya
Maritim yang ditindaklanjuti

x 100%

Total Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya
Maritim



4. IKU.4 Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan

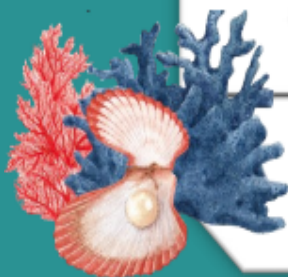
Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan merupakan capaian yang didapatkan dari perbandingan jumlah isu-isu strategis yang diselesaikan dengan total dari isu-isu strategis yang akan diselesaikan

Formula:

Jumlah Isu-Isu Strategis yang diselesaikan

x 100%

Total Isu-Isu Strategis



5. IKU.5 Nilai PMPRB pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.





Formula:


$$\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$$

6. IKU.6 Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Kegiatan dan Anggaran

Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 7 (tujuh) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 4 Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.300.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.300.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.000.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.500.000.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 14.500.000.000,-

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1040/MK.02/2022, pada Tahun 2023 diberlakukan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Anggaran efektif Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-	Rp150.000.000,-	2.050.000.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.300.000.000,-	Rp160.000.000,-	2.140.000.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.300.000.000,-	Rp160.000.000,-	2.140.000.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-	Rp100.000.000,-	1.900.000.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.000.000.000,-	Rp100.000.000,-	1.900.000.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.500.000.000,-	Rp155.150.000,-	1.344.850.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp150.000.000,-	2.050.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 14.500.000.000,-	Rp. 975.150.000,-	Rp13.524.850.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah hal-hal yang telah dicapai pada Triwulan IV Tahun 2023 guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan pada PK Deputi Koordinasi SD Maritim TA 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Pada TW 4, Kemenko Marves bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Yayasan Konservasi Indonesia melakukan perhitungan nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) Agregat Tahun 2023.
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)	Berfokus dengan Blue Health dan mengikuti beberapa kegiatan dan pertemuan terkait NBAAP dan Blue Health: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Indonesia National Blue Carbon Workshop di Labuan Bajo 2. Mengikuti Blue Food Forum and Kunjungan Lokasi Akuakultur dan Pusat Riset Bio-Industri di Lombok 3. Kunjungan NBAAP ke Kawasan Konservasi di Raja Ampat, Papua 4. Mengikuti Blue Innovation Forum-FGD & Sharing Session "Kolaborasi dalam Pengembangan Inovasi Biru" 5. Mengikuti Pertemuan Technical Committee National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) di Jakarta 6. Mengikuti Pertemuan Pre-Steering Committee NBAAP di Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan koordinasi dengan TNI AL dan Bakamla terkait pembangunan di Selat Lampa. Kemenko Marves mendukung dalam integrasi pembangunan pangkalan Bakamla dan pangkalan STT Natuna. - Telah dilaksanakan koordinasi terkait permasalahan sarpras penangkapan Ikan di Jawa Tengah dan peran Balai Besar Penangkapan Ikan saat ini.
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Blue Halo S	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan koordinasi dalam penyelesaian proposal pendanaan GCF dan koordinasi terhadap tata kelola proyek Blue Halo S yang akan diusulkan serta submit proposal pendanaan terhadap BKF
3			Koordinasi Pembangunan Ibu Kota Sofifi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan koordinasi dengan Bappenas terkait tindak lanjut pembangunan Kota Baru Sofifi dan dilakukan pencermatan terhadap program-program yang telah masuk sebagai program prioritas
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	<p>Progres pengerjaan Fisik Revitalisasi Irigasi Pertambakan Tradisional oleh Kementerian PUPUR di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai timeline. Namun demikian, K/L dan Pemda masih berupaya mencari jalan tengah agar penataan muara dapat tetap dilaksanakan.</p> <p>Pemda dan Pihak berwenang terus berupaya melakukan penataan terhadap tambak - tambak yang tidak berwawasan lingkungan di Karimunjawa. Sudah dilakukan pemotongan pipa pada 15 lokasi tambak</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
2			Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang	<p>Progres pengerjaan Fisik Revitalisasi Irigasi Pertambakan Tradisional oleh Kementerian PUPUR di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan telah berjalan sesuai timeline. Namun demikian, K/L dan Pemda masih berupaya mencari jalan tengah agar penataan muara dapat tetap dilaksanakan. Pemda dan Pihak berwenang terus berupaya melakukan penataan terhadap tambak - tambak yang tidak berwawasan lingkungan di Karimunjawa. Sudah dilakukan pemotongan pipa pada 15 lokasi tambak.</p>
3		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Pengembangan Seaweed Estate Terintegrasi	<p>Pemerintah Indonesia mendorong industrialisasi dan hilirisasi rumput laut. Beberapa lokasi yang akan dilaksanakan politing atau modeling saat ini adalah di Ekas Lombok Timur dan di Wakatobi Sulawesi Tenggara. Salah satu korporasi yang berinvestasi pada rumput laut terintegrasi hulu hilir adalah PT. Sea6 Energy. Produk yang akan dihasilkan adalah produk non food yaitu bio stimulan, bio plastik dan dalam jangka panjang akan melakukan hilirisasi bio fuel. Sementara di Wakatobi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong kegiatan budidaya rumput laut yang ramah lingkungan dengan luasan 50 ha</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Bandara I Gusti Ngurah Rai Sebagai Hub Logistik Udara Produk Kelautan dan Perikanan saat ini Telah diselenggarakan serangkaian rapat koordinasi dengan tujuan menginisiasi program ekspor produk kelautan dan perikanan dari Biak ke Narita. Inisiatif ini diharapkan dapat dilaksanakan sejalan dengan acara Sail Teluk Cendrawasih. Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah, serta sejumlah pelaku usaha.
2			Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer;	<ul style="list-style-type: none"> Telah diselenggarakan beberapa pertemuan dengan beberapa pengembang fasilitas iradiasi, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi iradiasi seperti CIRC dan Dasheng. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempresentasikan jenis teknologi iradiasi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, khususnya yang mendukung sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan.
3			Rumusan Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan	Program rencana standarisasi petugas mutu di pelabuhan perikanan hanya terlaksana satu kali sebelum TW IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
			dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi	
4			Rumusan Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	<p>Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan melalui Two Countries Twin Parks (TCTP). TCTP merupakan kerja sama kawasan industri yang digagas oleh Indonesia dan China untuk mempromosikan sinergi antara visi pembangunan prioritas kedua negara, yaitu "Poros Maritim Dunia" dan "Inisiatif Sabuk dan Jalan".</p> <p>Dalam bidang kelautan dan perikanan, TCTP berfokus pada pengembangan kawasan industri perikanan dan kelautan di Indonesia. Kawasan industri ini akan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan produksi, pengolahan, dan perdagangan produk kelautan dan perikanan.</p> <p>Salah satu proyek TCTP yang telah dilaksanakan adalah pembangunan basis perikanan dan kemaritiman di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Basis perikanan ini dibangun oleh Salim Group dari Indonesia dan Fuqing Shengtian Food Co., Ltd dari China. Basis perikanan ini memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 500 ribu ton dan akan menyerap tenaga kerja hingga 10.000 orang.</p> <p>Selain itu, TCTP juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama riset dan pengembangan (R&D) di bidang kelautan dan perikanan. Kedua negara akan bekerja sama dalam</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
				<p>mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor kelautan dan perikanan.</p> <p>Kerja sama TCTP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan maritim kedua negara.</p> <p>Berikut adalah beberapa manfaat dari kerja sama TCTP di bidang kelautan dan perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. • Menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. • Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. • Meningkatkan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia. • Meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. • Meningkatkan keamanan maritim Indonesia.
		<p>Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan</p>	<p>Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Produk Ekspor KP ke China</p>	<p>Untuk 5 UPI yang terkenal Suspend tinggi menunggu giliran pemeriksaan dari GACC karena antrian negara tidak hanya Indonesia dan sudah tidak mberlakukan kembali terkiat temuat jejak covid namun melihat penerapan sistem jaminan mutu dalam penanganan produk KP</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	<p>Total produksi per Bulan Oktober adalah 1.530.437 ton</p> <p>Hasil pemantauan dan verifikasi secara singkat adalah:</p> <p>Pra Produksi: Perlu Adanya Perubahan Mekanisme Penyediaan Data MKG, Percepatan Data Peta Lahan, Jumlah Petambak dan Penetapan Rencana Induk serta DED</p> <p>Produksi: Perlu dilakukan optimalisasi lahan integrasi, teknologi tunnel dan geomembrane untuk lahan garam rakyat serta mendorong pencapaian hasil program ekstentifikasi lahan</p> <p>Pasca Produksi: Perlu dilakukan optimalisasi pada manajemen gudang garam, harmonisasi data stok, dan validasi</p> <p>Pengolahan: Perlu dilakukan optimalisasi pabrik pengolah yang telah terbangun</p> <p>Pemasaran: Fasilitasi akses pasar bagi produsen dan perbaikan mekanisme pengawasan garam impor</p>
2			Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usahanya	
3			Rumusan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman	<p>Sebagai tindaklanjut setelah ditandatanganinya Implementing Arrangement ODA Pembentukan Sistem Aplikasi Pengelolaan Perairan Indonesia Menggunakan Satelit Geostationer Korea, maka telah dilakukan pengiriman barang hibah peralatan riset tahap I dari Korea ke Indonesia. Selanjutnya barang tersebut akan segera di register oleh Pemerintah Indonesia dan secara</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
				<p>paralel Kmenko Marves seebgai pihak yang bertandatangan akan mencari mitra teknis (kementerian/lembaga/perguruan tinggi) di Indonesia untuk menjalankan proyek.</p> <p>ODA Proyek Cirebon yang akan segera berakhir telah dilakukan adendum yang ketiga untuk mengakomodir pengiriman barang riset hibah tahap terkahir dan Kemenko Marves dalam masa penyelesaian proyek telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap barang hibah dan capaian yang telah didapatkan melalui ODA project Cirebon.</p> <p>ODA Proyek Peningkatan Kapasitas SDM yang sudah dilaunching pada tahun 2023 akan segera berjalan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia akan menjadi mitra teknis dalam menjalankan proyek. MTCRC sendiri sudah memiliki MOU dengan BPPSDM-KKP sebagai inisiasi awal kerjasama. Secara paralel sedang dilakukan koordinasi dalam menyusun task force dan penyelesaian dokumen Implementing Arrangement proyek ini. MOU dengan universitas-universitas di Indonesia juga telah diselesaikan sebagai mitra dalam menjalannya proyek.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Narasi Singkat Capaian Progress TW IV 2023
4		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	1. Kerja sama Penelitian Riset Kelautan OceanX	Sebagai tindak lanjut dari MoU Kemenko Marves-OceanX, telah dilaksanakan kegiatan persiapan hingga pelaksanaan rangkaian kegiatan di OceanX Pavillium pada COP28 di Dubai, telah terlaksana pengawalan terhadap persiapan keikutsertaan delegasi Indonesia pada UEA Mission 2023 dan tindak lanjut MoU berupa penandatanganan IA antara BRIN-OceanX


3.1.1 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

1. Indikator Kinerja 1 adalah “**Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan**”

IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	90%	80.54%	89.49%	0.4	0.2222	0.1988642	Ultimate Outcome

Telah disampaikan pada Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024 mengenai Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan yang kemudian diturunkan pada Sasaran Deputi menjadi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan



Berdaya Saing dengan IKU Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan.

Pada IKU tersebut 3 variabel yang dilaksanakan adalah Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian pada Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Ekspor Sektor Perikanan. Capaian yang dilaporkan masih capaian prognosa yang nilainya masih akan berkembang hingga perkiraan pada TW 1 TA 2024. Untuk nilai prognosa, capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2023 adalah 16,99 Juta ton, perikanan tangkap Tahun 2023 adalah 8,16 Juta ton dan nilai ekspor perikanan Tahun 2023 adalah 5,71 US\$.

Capaian Produksi Budidaya

Saat ini lahan untuk usaha budidaya perikanan belum sepenuhnya termanfaatkan, di satu sisi potensi tersebut seharusnya bisa dioptimalkan menjadi modal dasar pembangunan budidaya perikanan. Namun, dalam pengelolaannya diperlukan langkah – langkah strategis, dengan tetap memenuhi kaidah pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Komoditi unggulan saat ini yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah udang, rumput laut, bandeng, tilapia, lobster, kepiting. Untuk mendukung pengembangan komoditi unggulan ini beberapa modeling dan klaster telah dikembangkan seperti modeling budidaya udang di Kebumen, modeling budidaya rumput laut terintegrasi hulu hilir di Wakatobi, modeling pengembangan ikan tilapia di Kerawang. Selain itu dikembangkan skema pengembangan kampung budidaya dengan komoditi local yang sudah berkembang di berbagai lokasi.

Untuk nilai prognosa, capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2023 adalah 16,99 Juta ton atau tercapai 82 persen dari target 20,06 juta ton. Beberapa kendala yang dialami dalam pengembangan perikanan budidaya yaitu :

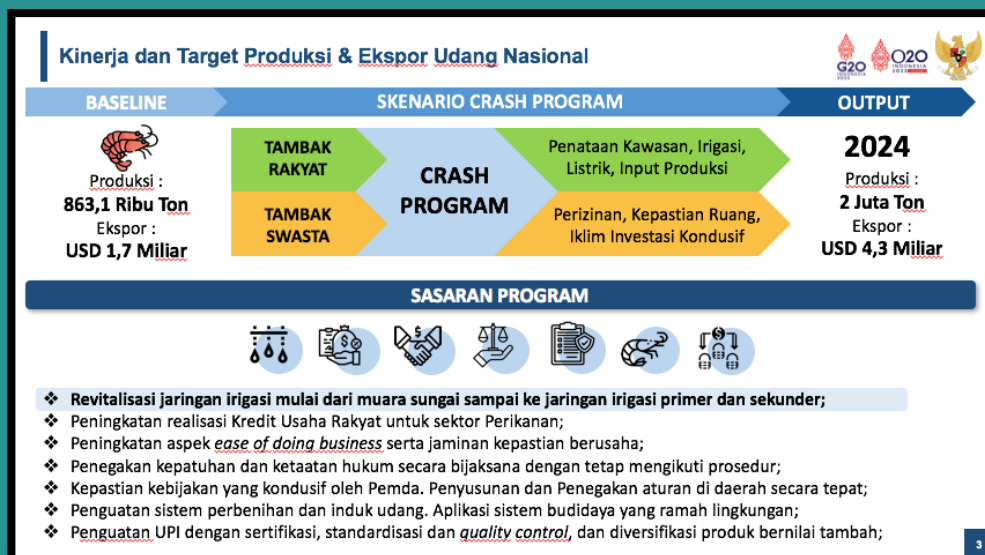
- Outbreak penyakit di sejumlah wilayah sentra produksi
- Kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai terutama kondisi pendangkalan saluran irigasi dan muara pada budidaya air payau.
- Realisasi investasi baru yang relatif terhambat akibat perijinan yang masih dinilai rumit dan panjang.

- Pada tahun 2023 Indonesia mengalami fenomena El Nino yang melanda hampir di sebagian besar provinsi. Kondisi tersebut yang memperparah dampak buruk dari ketiga faktor penyebab utama yang sebelumnya telah disebutkan.
- Masih lemahnya korporasi atau kemitraan pembudidaya
- Data dan perizinan budidaya yang belum mendukung investasi

Tindak lanjut :

- Pelaksanaan Crash Program Pokja Peningkatan Industri Udang Nasional;
- Revitalisasi Saluran Irigasi dan Muara Pertambakan Rakyat;
- Sosialisasi Praktik Usaha Udang Berwawasan Lingkungan ;
- Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi Perusahaan di sektor marikultur terintegrasi hulu – hilir untuk komoditas finfish dan rumput laut;
- Pelaksaaan ODA Porject Indonesia – Korea berupa hibah pembangunan fasilitas smart aquaculture di Batam, Natuna dan Maluku Tenggara serta penguatan kapasitas SDM;
- Fasilitas rencana investasi perusahaan asing di sektor perikanan budidaya;
- Penataan KJA di Danau – danau prioritas (Danau Toba, Jatiluhur, Sanguling, dan Cirata);
- Integrasi kelompok perikanan (POKLINA) kedalam Komisi Irigasi Provinsi;
- Relaksasi Kebijakan DHE SDA untuk keberlanjutan Industri Perikanan;
- Dukungan Penyelesaian tuduhan anti subsidi oleh asosiasi udang dan otoritas perdagangan AS;
- Piloting budidaya rumput laut skala besar (100 ha) di Lombok Timur.

Gambar 3 Crash Program dalam mendukung Industri Udang Nasional





Capaian Produksi Perikanan Tangkap

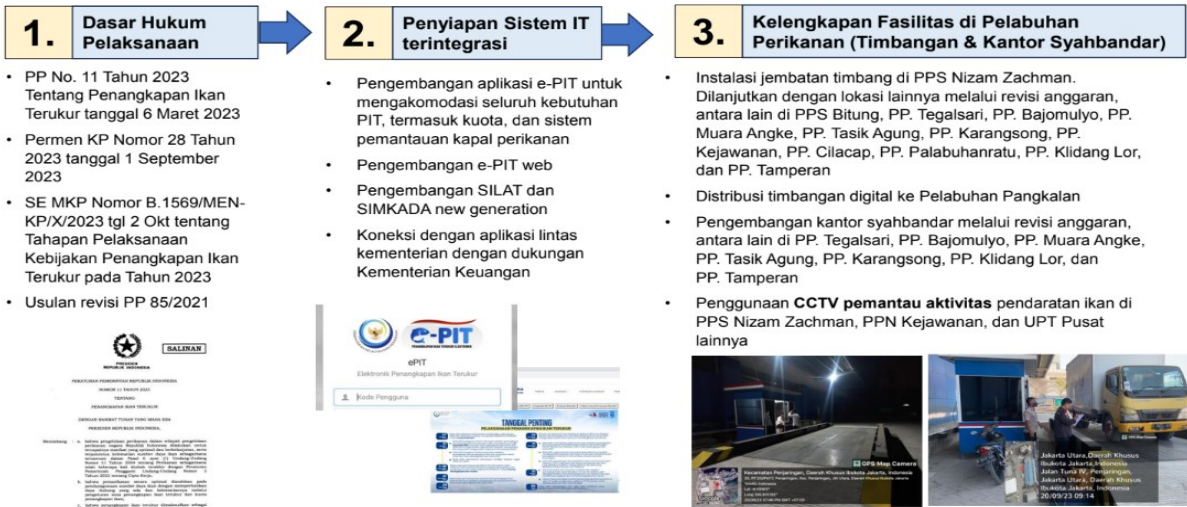
Pengelolaan perikanan tangkap harus dipandang dalam spektrum lebih luas yang dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan, menjamin pasokan dan keamanan pangan bagi konsumen lokal, domestik, bahkan internasional secara berkelanjutan, serta mampu berkontribusi terhadap PDB negara dan mengembangkan perekonomian wilayah. pelaku usaha perikanan tangkap skala menengah dan kecil yang selama ini belum optimal berperan dalam manajemen perikanan tangkap. Untuk nilai prognosa, capaian perikanan tangkap Tahun 2023 adalah 8,16 Juta ton. Namun hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu , Kendala capaian produksi perikanan tangkap 2023 salah satunya terkait kendala perizinan dikarenakan tidak diperkenankan penambahakan perizinan terkait perubahan izin dari pra produksi ke pasca produksi. Selain itu, kendala perubahan iklim seperti el nino menyebabkan nelayan tidak pergi melaut. Permasalahan lain yakni overfishing menyebabkan daerah penangkapan ikan semakin jauh dan stok ikan berkurang.

Tindak lanjut :

- Penerapan kuota penangkapan ikan
- Penguatan pengawasan
- Sosialisasi penangkapan ikan yang berkelanjutan

TAHAPAN PELAKSANAAN PIT DI TAHUN 2023

Hal 25



Gambar 4 Tahapan Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur 1

TAHAPAN PELAKSANAAN PIT DI TAHUN 2023

Hal 26



Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur 2



Capaian Nilai Ekspor Perikanan

Berdasarkan data statistic 2022 Indonesia berhasil mencapai nilai ekspor perikanan dan kelautan senilai USD 4,1 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan 14,4% dibandingkan tahun 2021. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa menjadi negara tujuan ekspor utama dengan kontribusi mencapai 60% dari total nilai ekspor.

Udang, tuna, cumi-cumi, ikan, dan rumput laut menjadi komoditas ekspor utama. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB nasional tahun 2022 mencapai 2,53%.

Meskipun capaian ini menunjukkan kinerja positif, masih terdapat peluang untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan dan kelautan Indonesia di pasar global. Diversifikasi pasar ekspor dan komoditas ekspor, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengembangan sumber daya manusia perlu terus dilakukan.

Capaian nilai ekspor perikanan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi US\$ 5,71 Miliar. Namun hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu :

- Kurangnya promosi dan branding produk Kelautan dan perikanan Indonesia di pasar internasional.
- Kualitas produk perikanan Indonesia yang belum terstandarisasi secara internasional.
- Persaingan yang ketat dari negara-negara lain, seperti Vietnam, Thailand, dan India.
- Biaya tarif masuk yang tinggi di beberapa negara tujuan ekspor.
- Kebijakan pemerintah yang belum optimal, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar-instansi terkait.
- Penyelidikan Anti-Dumping (AD) dan Anti-Subsidi (CVD) untuk Produk Olahan Udang Asal Indonesia oleh Otoritas Amerika Serikat yang berdampak pada penurunan ekspor Indonesia.



Tindak Lanjut :

1. Mendorong Kebijakan Pengembangan Akses Pasar Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan melalui hub bisnis:
 - Meningkatkan akses pasar ekspor untuk produk kelautan dan perikanan Indonesia.
 - Memperkuat kerjasama perdagangan internasional dengan negara-negara tujuan ekspor.
2. Kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Non Konsumsi (Ikan Hias, Koral, dll):
 - Mengembangkan produk kelautan dan perikanan non konsumsi yang bernilai tinggi.
 - Meningkatkan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan non konsumsi di pasar internasional.
3. Peningkatan Pemasaran Produk Kelautan Perikanan dalam negeri melalui:
 - Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan di Indonesia:
 - ✓ Meningkatkan edukasi dan promosi tentang manfaat konsumsi ikan.
 - ✓ Meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan.
 - Peningkatan Distribusi dan Akses Produk Kelautan dan Perikanan:
 - ✓ Membangun infrastruktur distribusi yang lebih baik.
 - ✓ Meningkatkan akses masyarakat terhadap produk kelautan dan perikanan.
4. Koordinasi langkah negosiasi dan trade remedies (dumping, subsidi dan safeguard) dalam melindungi industri produk KP dalam negeri dalam praktik perdagangan internasional:
 - Melakukan langkah-langkah anti-dumping, subsidi, dan safeguard untuk melindungi industri produk kelautan dan perikanan dalam negeri.
 - Meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan aturan perdagangan internasional.
5. Kajian terkait pembentukan hub bisnis untuk ekspor produk Kelautan dan Perikanan:
 - Melakukan kajian terkait pembentukan hub bisnis untuk ekspor produk kelautan dan perikanan.

- Membangun hub bisnis untuk ekspor produk kelautan dan perikanan.

Kesimpulan:

Capaian nilai ekspor perikanan dan kelautan tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja yang positif dan menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan. Diversifikasi pasar ekspor dan komoditas ekspor, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan kualitas produksi dan produktivitas, serta pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan dan kelautan Indonesia di pasar global. Disamping itu, diperlukan strategi dan bisnis plan yang tepat untuk mengembangkan pasar eksport melalui Bisnis Hub di beberapa region seperti Timur Tengah, Eropa, Tiongkok dan Amerika Utara.

3. Indikator Kinerja 2 adalah “**Indeks Kesehatan Laut Indonesia**”

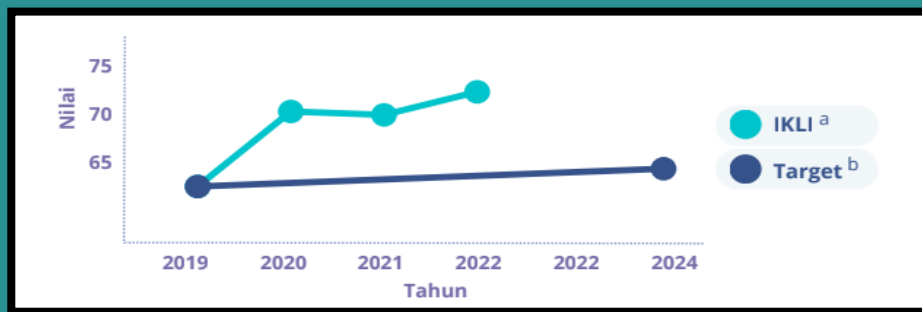
IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76	76.37	100.49%	0.4	0.2222	0.22330409	Ultimate Outcome

IKLI (Indeks Kesehatan Laut Indonesia) memiliki 10 tujuan, Penentuan tujuan IKLI yaitu adaptasi dari 10 tujuan OHI global menjadi IKLI nasional. Berikut adalah 10 Tujuan IKLI yaitu:



Gambar 6 10 Tujuan IKLI

Berikut merupakan grafik nilai capaian IKLI dari 2021-2023



Gambar 7 grafik nilai capaian IKLI dari 2021-2023

Indikator ini menggambarkan Capaian Indeks Kesehatan Laut Indonesia TA 2021-2023 yang dibandingkan dengan target pada renstra.

Capaian ini ditargetkan persentasenya dicapai pada TW IV TA 2023 dengan target capaian 76. Capaian ini berasal dari kegiatan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). Namun terdapat kendala yang

dialami dalam proses pelaksanaan IKLI, yaitu terdapat beberapa nilai/indeks untuk perhitungan IKLI belum di publish oleh walidata pada TW 4 2023, dan beberapa variabel juga perlu dilakukan evaluasi capaian pada awal tahun 2024. Sebagai bentuk tindak lanjut akan segera dilakukan finalisasi data untuk mendapatkan Nilai IKLI Agregat Tahun 2023 yang akan dipublikasikan pada awal tahun 2024.

3.1.2 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim

3. Indikator Kinerja 3 adalah **“Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti”**

IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%	0.2	0.11111	0.11111	Immediate outcome

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim Yang Ditindaklanjuti. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah penjelasan capaian output antara pada progress penyusunan rancangan kebijakan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan IV yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

1. Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia

IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76	76.37	100.49%	0.4	0.2222	0.22330409	Ultimate Outcome

Capaian dari penyusunan kebijakan “Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia” adalah sebagai berikut

- **Isu utama**

Fokus isu yang akan diselesaikan pada tahun 2023 terkait Terwujudnya Pengelolaan Jasa Kelautan yang optimal adalah kondisi dimana termanfaatkannya jasa-jasa kelautan dan sumber daya kelautan sesuai dengan peruntukannya dengan tetap berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan. Jasa kelautan yang dimaksud dalam konteks ini adalah nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) pada tahun 2023 dengan target yang telah disesuaikan pada Renstra Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Tahun 2023.

- **Pilihan Kebijakan**

Kemenko Marves menerbitkan Pedoman Pengukuran IKLI yang kemudian digunakan pertama kali untuk mengukur Skor IKLI pada tahun 2020 dengan menggunakan data tahun 2019. Pedoman Pengukuran IKLI telah mulai disosialisasikan untuk dipahami secara luas di kalangan akademisi dan diharapkan dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja pembangunan kelautan di tingkat provinsi.

- **Capaian**

berikut merupakan data capaian IKLI 2020-2023



Gambar 8 Data Capaian IKLI 2020-2023

No	TARGET / TUJUAN	IKLI 2020		IKLI 2021		IKLI 2022		IKLI 2023
		Data 2019	Update Data 2019	Data 2020	Update Data 2020	Data 2020	Update Data 2021	Data 2022
1	Laut Sebagai Sumber Pangan	7,65	7,80	9,02	9,02	8,87	8,01	8,81
2	Perikanan Artisanal	7,28	7,67	7,36	7,24	7,59	7,43	7,13
3	Laut Sebagai Sumber Produk Alam	8,66	8,05	6,27	6,27	5,82	5,62	5,90
4	Laut Sebagai Penyimpan Karbon	7,66	7,36	8,80	8,80	10,00	10,00	10,00
5	Perlindungan Pesisir	5,05	4,76	6,01	6,01	6,10	5,63	5,77
6	Laut Sebagai Sumber Mata Pencaharian	7,29	7,37	8,13	7,34	7,36	7,44	7,62
7	Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	8,07	8,33	5,72	5,72	5,71	5,10	6,24
8	Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	8,32	4,59	6,06	6,06	6,78	6,78	7,47
9	Perairan yang Bersih	5,82	7,23	9,12	8,29	7,43	7,43	7,43
10	Keanekaragaman Hayati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
SKOR TOTAL		75,79	73,44	76,76	73,06	75,65	73,43	76,37

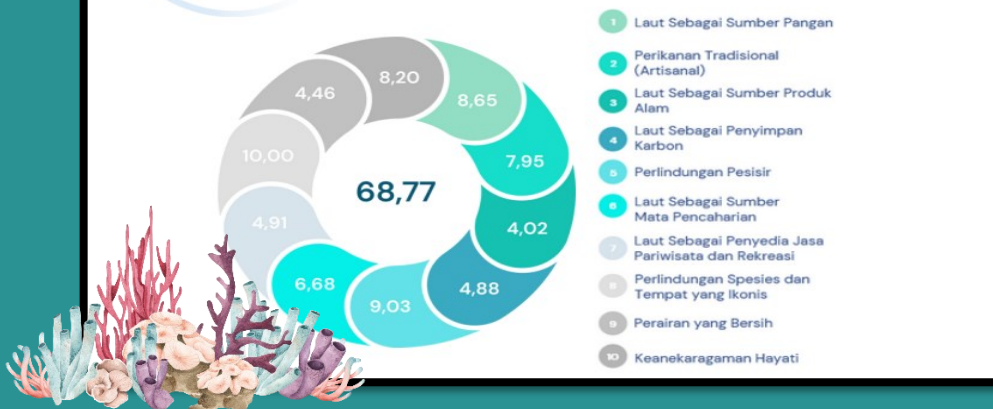
Tabel 5 Tabel capaian IKLI

Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan dari hasil akhir pengukuran kesehatan laut berdasarkan dengan variabel pengukuran yang ditetapkan. Pada tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia. **Diperoleh nilai IKLI Tahun 2023 yaitu sebesar 76,37.**

Untuk dapat mengukur 10 Tujuan IKLI, diperlukan variabel dan indikator data yang dapat membantu perhitungan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi laut Indonesia. Selain itu, harus terdapat tipe titik acuan untuk dapat membandingkan kondisi data yang sudah ada. Pada tahun 2020, Kemenko Marves menerbitkan Pedoman Pengukuran IKLI yang kemudian digunakan pertama kali untuk mengukur Skor IKLI pada tahun 2020 dengan menggunakan data tahun 2019.

Perhitungan skor IKLI sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan diharapkan untuk dilanjutkan setiap tahunnya dan tahun 2023 merupakan tahun ke-4 skor IKLI dihitung secara nasional setelah tahun 2020, 2021 dan 2022. Pedoman Pengukuran IKLI telah mulai disosialisasikan untuk dipahami secara luas di kalangan akademisi dan diharapkan dapat dikembangkan untuk mengukur kinerja pembangunan kelautan di tingkat provinsi.

INDEKS KESEHATAN LAUT DAERAH (IKLD) PROVINSI DKI JAKARTA




Gambar 9 nilai indeks IKLD 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta telah melakukan perhitungan nilai Indeks Kesehatan Laut Daerah (IKLD) Jakarta Tahun 2022-2023 dengan nilai Indeks Kesehatan Laut Daerah (IKLD) Provinsi DKI Jakarta 75,65 (Tahun 2022) dan 68,77 (Tahun 2023).

Grafik Perbandingan IKLI 2022 dan IKLD Provinsi DKI Jakarta 2023



Grafik 1 perbandingan nilai IKLI 2022 dan IKLD 2023



Program perhitungan Indeks Kesehatan Laut Jakarta akan menjadi pilot project perhitungan IKLI di level daerah. Perhitungan IKLI di level daerah oleh DKI Jakarta ini diharapkan akan di ikuti oleh provinsi lainnya, dan diharapkan Pemerintah Pusat berkerjasama dengan K/L dan NGO terkait dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembimbingan dalam perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia yang akan diadopsi ke level provinsi.

- **Faktor Pendukung**

Dukungan data dan laporan kinerja dari setiap K/L terkait setiap nilai/indeks Indikator dan Variabel perhitungan IKLI.

- **Kendala**

Beberapa nilai/indeks untuk perhitungan IKLI belum di publish oleh walidata pada TW 4 2023, dan beberapa variabel juga perlu dilakukan evaluasi capaian pada awal tahun 2024.

- **Tindak Lanjut**

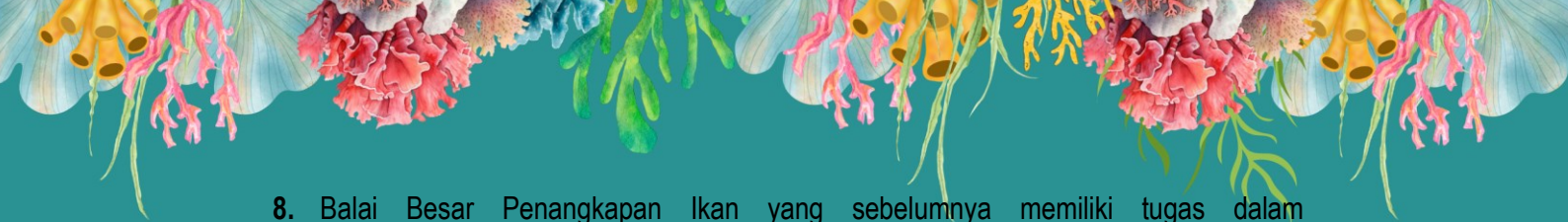
1. Diperlukan adanya upaya untuk estimasi skor IKLI berbasis model dinamis, model IKLI yang dinamis perlu dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.
2. Sebagai suatu indeks kumulatif, peran setiap lembaga untuk menyediakan data yang akurat memang sangat dibutuhkan. Di tingkat nasional, banyak lembaga yang berperan 5 dalam menyediakan data dalam proses estimasi IKLI. Bila saatnya IKLI diestimasi di tingkat daerah maka disarankan agar Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi bertanggung jawab dalam hal ini;
3. Pelaksanaan sosialisasi secara nasional (di Jakarta) sekaligus publikasi hasil IKLI 4 tahun berturut-turut dan pilot project IKLD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, dengan mengundang stakeholder pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, dan lembaga mitra internasional dan NGO.
4. Akan segera dilakukan finalisasi data untuk mendapatkan Nilai IKLI Agregat Tahun 2023 yang akan dipublikasikan pada awal tahun 2024.



2. Rancangan Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan

Capaian dari penyusunan kebijakan “Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan” adalah sebagai berikut:

- **Isu Utama**
 1. Terdapat konflik kepentingan terhadap pengembangan SKPT Natuna. Hal tersebut dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan Pangkalan STT Natuna. Permasalahan sudah dimediasi oleh Kemenko Marves dan ditindaklanjuti dengan pengembangan yang terintegrasi dari dua fasilitas tersebut.
 2. Permasalah ditemukan pada beberapa infrastruktur Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah pendangkalan pada dermaga dan kolam pelabuhan, kurangnya akses pelabuhan perikanan untuk keperluan transportasi, dan banjir rob.
- 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang dikelola provinsi rata-rata memiliki fasilitas yang kurang memadai dikarenakan kurangnya pendanaan. Sedangkan saat ini, PPP memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap PNBPN perikanan. Bagi hasil dari PNBPN kepada pelabuhan perikanan yang dikelola provinsi perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga PPP dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelaku usaha perikanan.
- 4. Dalam mendukung proses investasi ada beberapa aspek yang masih dipenuhi pelabuhan perikanan antara lain ketersediaan lahan, dan fasilitas perbaikan kapal.
- 5. Kapal penangkap ikan yang beroperasi lebih dari >12 mil diharuskan memiliki izin pusat dan diwajibkan memiliki Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Biaya pemenuhan SPKP ini dinilai masih terlalu tinggi dari pengusaha penangkapan ikan.
- 6. Kapal perikanan di Indonesia diwajibkan dibuat di dalam negeri, namun galangan kapal perikanan di Indonesia rata-rata masih tradisional. Kapal perikanan perlu dibuat lebih modern lagi untuk meningkatkan efisiensi dalam penangkapan ikan, dan keselamatan. Selain itu perlu diterapkan standar internasional seperti Konvensi ILO No 188 untuk kapal perikanan.
- 7. Di berbagai daerah mengeluhkan keterbatasan BBM bersubsidi bagi kapal perikanan dengan perizinan daerah yang menangkap di perairan <12 mil.



8. Balai Besar Penangkapan Ikan yang sebelumnya memiliki tugas dalam pengembangan, pengujian dan penerapan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan telah memberikan banyak inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan berpindahnya peran kepada BRIN, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk keberlangsungan proses inovasi dalam mendukung penangkapan ikan yang berkelanjutan.

- **Pilihan Kebijakan**

- 1. Pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi.**

Pengembangan pelabuhan perikanan perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat sebagaimana semestinya. Klasifikasi pelabuhan juga perlu ditinjau ulang dengan menyesuaikan kapasitas pelayanan yang diberikan. Pengembangan pelabuhan perikanan juga tidak dilakukan terbatas pada anggaran pemerintah saja dan dapat dilakukan kerja sama internasional maupun lembaga non pemerintah.

- 2. Modernisasi kapal perikanan.**

Kapal perikanan yang diproduksi galangan kapal di Indonesia masih berupa kapal yang tradisional. Kapal perikanan yang lebih modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penangkapan ikan, mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan perlindungan terhadap awak kapal perikanan.

- 3. Inovasi sarana prasarana penangkapan ikan yang berkelanjutan.**

Riset dan inovasi dalam sarana prasarana penangkapan ikan perlu terus dilakukan untuk dapat terus menjamin kelestarian lingkungan maupun keberlangsungan usaha penangkapan ikan.

- **Capaian**

Pembangunan SKPT dan pengembangan STT TNI di selat Lampa dilakukan secara sinergi dan dipastikan aspek safety ketika berada di satu lokasi Selat Lampa Pembangunan SKPT dilakukan dengan menggunakan loan secara produktif dalam durasi 2023-2028.

- **Faktor Pendukung**

1. Bakamla bersedia untuk mengedepankan kepentingan bersama dalam pembangunan pangkalan
2. Meningkatnya dukungan dari KKP terhadap pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah daerah



- **Kendala .**

Masih belum dilakukan koordinasi terkait integrasi pembangunan pangkalan di Natuna

- **Tindak Lanjut**


Sarana prasarana perikanan tangkap yang berkelanjutan memastikan usaha penangkapan ikan dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen dengan tetap mempertahankan keberlangsungan ekosistem. Pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi perlu dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi usaha penangkapan ikan dan tetap sejalan dengan upaya konservasi lingkungan. Kapal perikanan perlu dimodernisasi untuk meningkatkan efisiensi dan perlindungan terhadap awak kapal perikanan. Inovasi terkait sarana prasarana penangkapan ikan perlu terus dilanjutkan untuk dapat menjamin

3. Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

- **Isu Utama**

Pada tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan target bahwa volume produksi udang di Indonesia pada tahun 2024 mampu mencapai 2 (dua) juta ton. Diharapkan, sebagian besar dari angka produksi tersebut ditujukan untuk ekspor. Implikasi yang diharapkan oleh Pemerintah, yakni Indonesia mampu masuk sebagai 5 besar negara pengeksport produk perikanan global. Pada tahun 2023, beberapa isu utama yang berkembang, antara lain:

- A. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait keragaan kondisi pertambakan udang nasional. Saat ini, sebagian besar tambak udang di Indonesia didominasi oleh tambak tradisional (produktivitas 0,6 Ton/Ha/Tahun) dengan luasan mencapai 247.803 Ha (>90% dari total luasan pertambakan nasional). Tidak hanya itu, dukungan program ataupun kebijakan dari K/L selain KKP juga sangat minim;
- B. Pada tahun 2022, Pemerintah telah menyusun pedoman perizinan berusaha yang telah mensimplifikasi regulasi eksisting dari semula sebanyak 21 jenis regulasi dari beberapa K/L berbeda menjadi hanya 3 regulasi melalui sistem OSS. Namun, berdasarkan laporan dari masyarakat pedoman tersebut belum mampu diaplikasikan oleh Pemda terkait. Sosialisasi oleh Masyarakat masih relatif minim;
- C. Kondisi Infrastruktur dasar terutama saluran irigasi dan muara, relatif tidak memadai. Hampir diseluruh pertambakan di Indonesia kondisinya mengalami pendangkalan serius. Sebagai tambahan, afirmasi kebijakan baik dalam bentuk program ataupun anggaran dari K/L terkait untuk mengatasi persoalan tersebut masih relatif minim. Fokus program pemerintah masih terkonsentrasi pada komoditas – komoditas tanaman;

- 
- D. Pada pertengahan tahun 2023 Pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengatur tata kelola dan lalu lintas devisa hasil ekspor produk sumber daya alam. Akan tetapi, eksportir produk perikanan menilai bahwa kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mengakselerasi produksi dan ekspor produk perikanan serta mampu memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap keberlanjutan industri perikanan nasional secara umum;
- E. Pada Triwulan 4 tahun 2023, Pemerintah Indonesia menerima surat dari Pemerintah AS terkait penyelidikan Anti – Dumping dan Anti – Subsidi terhadap produk olahan udang Indonesia. Persoalan tersebut akan berdampak besar terhadap keberlanjutan hulu – hilir industri udang nasional serta daya saing produksi indonesia di pasar global;

- **Pilihan Kebijakan**


- 1. Revitalisasi Pertambakan Udang Tradisional**

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, Unit Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah mensinergikan program dan kebijakan pada K/L terkait untuk mendukung upaya tersebut. KKP dalam hal ini dikoordinasikan agar memberikan afirmasi berupa penyusunan dokumen detail engineering design di lokus – lokus yang sudah ditetapkan secara bersama, sedangkan PUPR dalam hal ini dikoordinasikan untuk menindaklanjuti dokumen yang sudah disusun melalui pembangunan fisik.

Berdasarkan progres kebijakan dan program yang sudah berjalan dapat disampaikan, Hingga TW 4 tahun 2023, Dokumen DED yang sudah disusun oleh KKP dan sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR melalui pembangunan fisik, yakni lokus pertambakan udang yang ada di Provinsi Lampung, Aceh Timur dan Sulawesi Selatan. Kemudian, pada tahun 2023, KKP juga sedang menyusun DED untuk lokus pertambakan yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ditargetkan DED tersebut dapat ditindaklanjuti oleh PUPR pada tahun 2024.

- 2. Menuntaskan Crash Program Revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2022 – 2024.**

Dalam rangka mewujudkan target produksi udang hingga 2 Juta Ton pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kementerian



Lembaga terkait telah menginsiasi pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Udang Nasional pada tahun 2022. Didalam Pokja tersebut, seluruh K/L terkait telah bersama-sama menyusun Crash program untuk TA. 2022-2024. Crash program ini yang kemudian diharapkan menjadi acuan bagi semua Kementerian Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan Asosiasi Perikanan serta lembaga swasta lainnya, untuk melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung pengembangan dan percepatan industri udang nasional.

Crash Program tersebut telah diundangkan melalui Kepemenko No. 42 Tahun 2022 tentang Crash Program Revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2022 – 2024. Terdapat 7 Bidang Program, yakni Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Bidang Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan, Bidang Dukungan Infrastruktur Produksi, Bidang Tata kelola dan Kelembagaan, Bidang hilirisasi Produksi dan Pemasaran, dan Bidang Pelatihan, Riset dan Penyuluhan.

3. Evaluasi Kebijakan Retensi Dana DHE SDA di Sektor Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi pada prinsipnya mendukung penerapan PP No. 36 tahun 2023. Dari masukan yang didapatkan, Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali terkait Penerapan PP No. 36 tahun 2023 dan reuiu KMK 272 Tahun 2023 terhadap keberlanjutan sektor perikanan, mengingat Persentase kontribusi DHE Sektor Perikanan relatif sangat kecil jika dibandingkan sektor lain seperti Pertambangan dan Perkebunan.

Menyikapi situasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Kedeputan Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, telah bersurat Kepada Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian dan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali kebijakan retensi devisa tersebut untuk sektor perikanan.

• Capaian

- ✓ Tahun 2022, telah ditetapkan lokasi tambak udang tradisional menjadi tambak semi intensif yang tersebar di Sumatera Utara seluas 10.000 ha, Aceh Timur, Aceh barat, banyuasin dan lampung selatan. Kemudian, Nusa Tenggara seluas 2.000 ha yang belokasi di Bima dan

Dompu. Selanjutnya, Sulawesi seluas 22.500 ha yang berlokasi di Gorontalo Utara, Donggala, Wajo, Pinrang, Takalar, Kolaka, Kolaka Utara dan Polewali Mandar. Serta Kalimantan seluas 10.500 ha yang berlokasi di Sukamara, tanah Tumbu, tanah laut, Kutai Kartanegara, dan tana Tidung.

Tabel 6 Strategi Pencapaian Produksi dengan Revitalisasi dan Modelling.

Sistem Budidaya	Lahan Eksisting 2019 (Ha)	Produktivitas (ton/ha/ tahun)	Produksi 2019 (ton)	Target luas lahan tahun 2024 (ha)	Produktivitas (ton/Ha/Thn)	Produksi (Ton)
Intensif	9.055	30	271.658	9.055	30	271.650
Semi intensif	43.643	10	436.430	43.643	10	436.430
Tradisional	247.803	0,6	148.683	242.803	2	485.606
Peningkatan produksi melalui modelling :						
• Tradisional	-	-	-	5.000	80	400.000
• Lahan baru	-	-	-	6.000	80	480.000
TOTAL	300.501		856.753	306.501		2.073.686


Sumber: DJPB, KKP (2022)

- ✓ Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi para investor sebagai amanah dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah melakukan penyusunan dan penyederhanaan buku panduan perizinan usaha tambak udang dari 21 (dua puluh satu) jenis perizinan menjadi 1 jenis perizinan melalui OSS.

Pada 2023, Telah dilaksanakan sosialisasi terkait hasil simplifikasi Perizinan usaha tambak udang yang terdiri dari KKPR, KKPR Laut, Lingkungan, Sertifikasi Standar dan CBIB, Pengusahaan Sumber Daya Air, dan Pemanfaatan ALSE. Sosialisasi meliputi Alur proses, persyaratan, tahapan dan biaya perizinan dasar dan perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Koordinasi juga dilakukan terkait tata cara pengawasan dan pemberian sanksi pada usaha tambak udang, disertai konsultasi dan proses langsung perizinan usaha tambak udang.

- 
- ✓ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kementerian Lembaga yang bergabung dalam Kelompok Kerja Peningkatan Produksi Udang Nasional, bersama-sama menyusun Crash program peningkatan Produksi Industri Udang TA. 2022-2024. Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi telah menetapkan Crash Program ini dalam Kepemenko No. 42 Tahun 2022 tentang Crash Program Revitalisasi tambak dan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang Tahun 2022 – 2024.

- **Faktor Pendukung**

- ✓ Dukungan Kebijakan dan anggaran oleh Pemda dan Kementerian PUPR pada upaya revitalisasi tambak udang;
- ✓ Dukungan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Jepara, KKP dan KLHK

- **Kendala**

- ✓ Upaya revitalisasi muara masih terkendala. Pemerintah masih terus berupaya melakukan koordinasi dengan K/L dan stakeholder terkait;
- ✓ Sebagian pemilik tambak serta asosiasi masih menolak upaya tersebut dan berusaha mengupayakan jalur dialog;

- **Tindak Lanjut**


- ✓ Koordinasi dengan KLHK untuk mencari solusi alternatif agar upaya revitalisasi muara (yang sudah ditumbuhi oleh mangrove - mangrove baru) bisa dilaksanakan. Tidak terbatas pada 2 provinsi yang saat ini sedang mendapat intervensi program, melainkan secara nasional;
- ✓ Akan dilakukan kajian dengan melibatkan stakeholder dari sektor lingkungan, perikanan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. agar diperoleh analisis mendalam serta solusi yang lebih inovatif berdasarkan cost benefit

4. Rancangan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin

Produk Kelautan dan Perikanan

- **Isu Utama**

1. Ketersediaan sarana dan prasarana logistik perikanan yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil;
2. Menurunnya kualitas produk perikanan akibat penanganan yang tidak tepat, termasuk penyimpanan yang tidak memadai;

- 
3. Keterbatasan pasokan energi listrik di daerah-daerah terluar dan terpencil yang memiliki potensi perikanan tinggi;
 4. Kurangnya integrasi pelabuhan perikanan dengan pelabuhan laut serta keterbatasan pelayanan moda transportasi dan penyedia jasa logistik.

- **Pilihan Kebijakan**

- 1. Kerjasama Hibah Proyek Solar Cold Chain Green Economy (SOCOOL) antara**

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Salah satu upaya dalam pemenuhan sarana dan prasarana rantai pasok dingin produk kelautan dan perikanan adalah dengan pemanfaatan teknologi solar panel untuk cold chain, sehingga Kemenko Marves mengkoordinasikan terkait kerja sama Hibah Proyek Solar Cold Chain Green Economy (SOCOOL) dengan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) dan juga K/L terkait. Untuk itu, sebagai percepatan tindaklanjut kerja sama dan kaitan pelaksanaan teknis, Kemenko kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KEBTKE) sebagai Executing Agency Project So Cool untuk segera melakukan penandatanganan Implementing Arrangement bersama The GIZ sebelum batas waktu yang di tentukan yaitu 31 Desember 2023. Sementara Kemenko Marves dan K/L Terkait lainnya agar tetap mendukung keberlanjutan realisasi dari kerja sama tersebut yang dapat dilakukan melalui tim task force.

- 2. Ekspor Langsung Produk Perikanan Biak-Narita**

Rencana mendorong Ekspor Langsung Produk Perikanan Biak-narita bertujuan untuk mengurangi biaya logistik yang besar dan jarak tempuh yang lama dikarenakan harus transit dulu ke Surabaya atau Jakarta sehingga pemerintah daerah biak mengusulkan kepada Menko Marves untuk bisa dilakukan ekspor langsung produk kelautan dan perikanan Biak-Narita. Pada tanggal 2 Februari 2023 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dengan didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri PUPR dan Kepala Bappenas telah meresmikan penyelenggaraan Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023



3. Bandara I Gusti Ngurah Rai Sebagai Hub Logistik Udara Produk Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional telah mengamanatkan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai Bandara Internasional yang memiliki rute penerbangan etrbanyak ke luar negeri terbesar memiliki posisi strategis dalam mendorong Ekspor Produk Kelautan Perikanan bai dari wilayah Bali maupun dari Wilayah Sekitar Bali (Bali Nusra). Hingga saat ini masih ada 70% lower limmit capacity dari Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dapat dimanfaatkan untuk Ekspor secara langsung ke luar negeri. Maka Deputy Bidang Sumber Daya Maritim yang dibantu dengan Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing berupaya mewujudkannya dalam kerangka tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikand dan mengendalikan terwujudnya Bandar Udara IGNR menjadi Hub Logistik Udara Produk Kelautan dan Perikanan. Beberapa rapat koordinasi lintas intstansi dan beberapa pemangku kepentingan telah dilaksanakan dan telah disusun kajian terkait Hub Logistik Udara Bandara I Gusti Ngurah Rai.

• Capaian

1. Telah dilakukan unjungan lapangan dalam rangka mendukung optimalisasi sarana prasarana rantai dingin produk kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Dukungan Koordinasi Terselenggaranya Kebijakan Fasilitas Ekspor Produk KP secara Direct Flight dari Kabupaten Biak
3. Dukungan Koordinasi Penetapan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali menjadi salah satu pintu gerbang (hub logistik udara) ekspor produk-produk Perikanan

• Faktor Pendukung

- ✓ Penerbangan yang masuk ke igusti Ngurah rai sangat tinggi sehingga potensi sangat besar untuk bisa dimanfaatkan
- ✓ Kabupaten Biak memiliki potensi untuk melakukan ekspor langsung ke pasar Cina, Hongkong, dan Jepang melalui Bandara Frans Kaisiepo International Airport, dengan memaksimalkan ketersediaan pasokan bahan baku produk perikanan premium dari wilayah sekitar, seperti Kab. Sarmi, Kab. Yapen, dan Kab. Waropen.
- ✓ Kab. Biak, Sarmi, Yapen, dan Waropen memiliki potensi ikan bernilai tinggi yang berlimpah dan dapat di ekspor langsung melalui udara, seperti ikan segar, ikan hidup, udang segar, dan kepiting hidup.



- **Kendala**

- ✓ Supply bahan baku produk perikanan premium (ikan segar dan ikan hidup) dari wilayah Biak tidak memenuhi kuota minimum cargo udara sebesar 23,5 - 60 Ton (Boeing 737-800F dan Airbus A330-200F).
- ✓ Informasi dari Dit. Investasi KKP, hingga hari ini Tanggal 18 September 2023 baru terkonsolidasi 15,5 Ton yang terdiri dari 15 Ton dari PT. Indo Numfor Pasifik dari Ambon dan 500 kg udang (giant shrimp) dari PT. Bartuh di Timika.
- ✓ Di sisi lain rute dan jarak penerbangan dari Ambon ke Manado lebih dekat dan efisien daripada ke Biak sehingga lebih ekonomis untuk pengangkutan jalur udara
- ✓ Belum tersedianya fasilitas logistik rantai dingin yang memadai dan jalur pengangkutan untuk mendukung supply bahan baku produk ekspor via udara dari wilayah sekitar Biak seperti dari Kab. Sarmi, Kab. Yapen dan Kab. Waropen.

- **Tindak Lanjut**

- ✓ Pengembangan infrastruktur dan fasilitas bandara. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur dan fasilitas bandara untuk mendukung kegiatan logistik udara produk kelautan dan perikanan, seperti pembangunan terminal kargo yang lebih besar dan modern, pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengolahan produk perikanan, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya, seperti fasilitas karantina dan keamanan.
- ✓ Peningkatan konektivitas penerbangan. Pemerintah perlu meningkatkan konektivitas penerbangan untuk mempermudah akses ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dari berbagai wilayah di Indonesia dan dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan rute penerbangan dan peningkatan frekuensi penerbangan.
- ✓ Peningkatan efisiensi layanan logistik. Pemerintah perlu mendorong penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengiriman dan penerimaan produk perikanan untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik.
- ✓ Peningkatan promosi dan pemasaran. Pemerintah perlu meningkatkan promosi dan pemasaran produk perikanan Indonesia untuk meningkatkan awareness masyarakat global terhadap produk perikanan Indonesia.
- ✓ Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas bandara.
- ✓ Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk mempromosikan produk perikanan Indonesia di berbagai forum internasional.



5. Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer

• Isu Utama

1. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari pasar internasional semakin meningkat;
2. Kasus penolakan ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia oleh negara pembeli masih terus terjadi;
3. Teknologi Iradiasi memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pada produk pangan, serta membebaskan dari jasad renik patogen;
4. Teknologi Iradiasi sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, namun jumlahnya terbatas dan lokasinya tidak strategis;
5. Pengembangan teknologi Iradiasi merupakan isu nasional, oleh karena itu, perlu kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder);
6. Diperlukan pertimbangan untuk mengembangkan fasilitas teknologi Iradiasi di beberapa lokasi sentra produk kelautan dan perikanan, guna memudahkan akses bagi para pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya.

• Pilihan Kebijakan

✓ Pengembangan Fasilitas Iradiasi


Unit Iradiator dapat memiliki fungsi ganda, tidak hanya untuk produk kelautan dan perikanan, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk berbagai produk lainnya, termasuk pertanian, perkebunan, kehutanan, kosmetik, alat kesehatan, dan lain-lain.

✓ Pemilihan Lokasi Strategis

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, disepakati untuk membangun unit iradiator di tiga lokasi strategis, yakni Surabaya, Pelabuhan Perikanan Bitung-Manado, dan Pelabuhan Perikanan Belawan-Medan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga lokasi tersebut memiliki sejumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan berstatus sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), yang dapat memfasilitasi transportasi, distribusi, dan logistik produk kelautan dan perikanan secara efisien, baik dalam maupun luar negeri.

• Capaian

Sebagai anggota IAEA, Indonesia mengatur regulasi iradiasi pangan dalam Undang-Undang Pangan No. 18/2012. Pelaku usaha berharap instalasi iradiasi ditempatkan strategis, mendapatkan subsidi jika menjadi prioritas ekspor, dan mengharapakan koordinasi K/L dan pelaku usaha dalam pembangunan iradiator energi tinggi sebagai isu nasional. Kemenko Marves



mendorong pemanfaatan teknologi iradiasi dalam menjaga kualitas ekspor produk kelautan dan perikanan serta memenuhi persyaratan mutu dari negara pembeli. Harapan kami agar KKP menjalankan upaya ini secara lebih intensif dan efektif.

- **Faktor Pendukung**

Partisiapsi aktif dari para calon investor teknologi iradiasi, Dengan keterlibatan mereka, diharapkan adanya kontribusi signifikan dalam penelitian, pengembangan, dan implementasi solusi inovatif yang dapat membawa manfaat positif dalam berbagai sektor terkait.

- **Kendala**

Ada satu perusahaan yang dikenal sebagai PT Jaya Mitrakarya Manunggal (PT JMM) yang memiliki rencana untuk membangun fasilitas iradiator di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Namun, proyek ini mengalami kendala terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tidak sesuai dengan kategori perusahaan tersebut, karena PT JMM bermaksud mengajukan Tax Holiday.

- **Tindak Lanjut**

1. Kemenko Marves seharusnya mendorong pelaksanaan pengembangan teknologi iradiasi untuk produk kelautan dan perikanan di Indonesia.
2. Kemenko Marves sebaiknya mendukung BRIN dalam melakukan kajian atau Studi Kelayakan terkait rencana pembangunan unit iradiator baru. BRIN, sebagai lembaga dengan keahlian di bidang nuklir dan pengalaman riset yang relevan, dapat berperan penting dalam penyusunan rencana tersebut.
3. Sebagai lokasi strategis, diusulkan tiga lokasi untuk pembangunan fasilitas iradiasi baru di Indonesia, yaitu Surabaya, Manado, dan Medan. Setiap lokasi direncanakan memiliki dua model fasilitas, menggunakan Sinar Gamma dan Mesin Berkas Elektron (MBE).
4. Kemenko Marves seharusnya memberikan dukungan kepada Bappenas, terutama terkait dengan penambahan anggaran dalam proses penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk produk pangan iradiasi baru yang akan diusulkan oleh instansi terkait.
5. Kemenko Marves sebaiknya menunjuk otoritas yang kompeten untuk mengelola fasilitas teknologi iradiasi di Indonesia.



6. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu Sampai Hilir yang Terintegrasi

- Isu Utama

Sertifikasi Mutu

Sejalan dengan meningkatnya permintaan produk perikanan Indonesia di pasar internasional, kegiatan ekspor semakin meningkat. Peningkatan ini juga sejalan dengan meningkatnya persyaratan yang diajukan oleh negara-negara tujuan ekspor. Jaminan mutu sistem produk perikanan yang akan diekspor harus didukung oleh sertifikasi yang membuktikan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang terjamin, termasuk dalam proses produksinya. Namun, kendala yang dihadapi adalah jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang jauh lebih banyak daripada jumlah pemasok ikan, petambak, dan kapal ikan yang telah memperoleh sertifikasi CPIB dan CBIB. Hal ini menyebabkan UPI terus menerima pasokan bahan baku dari sumber- sumber yang belum memiliki sertifikasi jaminan mutu.

Fasilitas Penunjang Mutu

Dalam penerapan sistem jaminan mutu pada produk kelautan dan perikanan, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Faktor ini meliputi fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan perikanan, fasilitas kebersihan, dan sanitasi. Secara umum, masih terdapat kekurangan fasilitas penunjang di lokasi pelabuhan perikanan, seperti sarana bangunan yang mulai rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kurangnya sarana pendukung kebersihan, serta fasilitas sanitasi yang kurang baik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas ikan karena berkaitan erat dengan kebersihan, yang dapat menyebabkan ikan hasil tangkapan cepat membusuk. Selain itu, keberadaan laboratorium uji mutu di lokasi aktivitas pendaratan ikan sangat penting untuk mendukung penerapan sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan yang optimal.

Petugas Mutu

Faktor lain yang memegang peran krusial adalah kecukupan jumlah petugas mutu di lapangan. Berdasarkan hasil survei dan rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, sebagian besar lokasi aktivitas perikanan masih mengalami kekurangan petugas mutu. Jumlah petugas mutu berpengaruh pada efektivitas kegiatan di lapangan; jika jumlah petugas mutu kurang, hasil perikanan yang tidak teruji kualitas mutunya akan meningkat. Kekurangan petugas mutu yang telah tersertifikasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya bimbingan teknis bagi

sebagian petugas mutu, pemindahan tugas ke instansi lain, dan ketidakterediaan rekrutmen penambahan petugas mutu yang baru. Oleh karena itu, ketersediaan petugas mutu yang telah tersertifikasi menjadi perhatian utama.

- **Pilihan Kebijakan**

1. **Sertifikasi Mutu**

Sertifikasi melibatkan serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat untuk produk, sarana dan prasarana, proses, personel, serta sistem mutu. Untuk memastikan mutu setiap produk perikanan dari Indonesia, langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan jaminan mutu melalui sertifikasi, menerapkan ketertelusuran (traceability), dan melaksanakan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara kelembagaan serta dengan menerbitkan peraturan.

2. **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas Mutu**

Petugas mutu mencakup ranah perikanan budidaya dan tangkap, serta menangani aspek mutu secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih efektif dan penambahan petugas inspeksi yang dapat mendukung kegiatan tersebut.

3. **Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Pra-Sarana Penunjang Mutu**

Dalam implementasi sistem jaminan mutu yang baik, dukungan dari sarana prasarana (sarpras) penunjang sangat diperlukan.

- **Capaian**

Telah dilakukan rakor koordinasi rencana pembuatan Standardisasi kompetensi dan kuantitas petugas mutu pelabuhan perikanan di lantai 15, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tanggal 31 Maret 2023





- **Faktor Pendukung**


Kemenko Marves berkoordinasi dengan K/L terkait untuk peningkatan petugas mutu serta edukasi masyarakat terkait pentingnya memilih produk perikanan yang bermutu.

- **Kendala**

1. Jumlah personil mutu di Pelabuhan Perikanan kurang
2. Kompetensi Personil Mutu di Pelabuhan Perikanan kurang
3. Peta Sebaran Personil Mutu di Pelabuhan Perikanan kurang proporsional
4. Tugas Rangkap
5. Mutasi Kerja
6. Pelatihan Kurang

- **Tindak Lanjut**

Berdasarkan analisis di atas, dirasa perlu untuk mendorong penerapan sistem jaminan mutu melalui sertifikasi guna memastikan bahwa produk yang ditujukan untuk kebutuhan ekspor memenuhi semua aspek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu diberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana penunjang mutu, serta peningkatan kualitas dan jumlah petugas mutu perikanan yang harus dimasukkan ke dalam program prioritas. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Sumber Daya



Maritim yang di dampingi oleh Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, terutama unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM). Pilihan kebijakan yang telah disampaikan di atas sepantasnya diarahkan kepada BKIPM, yang berperan sebagai otoritas kompeten dalam sistem jaminan mutu produk kelautan dan perikanan.

7. **Rancangan Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan**

• Isu Utama

- ✓ Kurangnya promosi dan branding. Produk kelautan dan perikanan Indonesia masih belum dikenal luas oleh masyarakat, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi dan branding yang dilakukan oleh para pelaku usaha serta dukungan pemerintah
- ✓ Kualitas produk yang belum terstandarisasi. Produk kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki kualitas yang beragam, mulai dari kualitas yang baik hingga kualitas yang buruk. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti teknologi penangkapan dan pengolahan yang belum optimal, serta kurangnya penerapan standar kualitas.
- ✓ Persaingan yang ketat. Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain dalam memasarkan produk kelautan dan perikananannya. Negara-negara lain, seperti Tiongkok, Vietnam, dan Thailand, telah memiliki keunggulan dalam hal kualitas, harga, dan promosi.
- ✓ Kebijakan pemerintah yang belum optimal. Kebijakan pemerintah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar-instansi pemerintah dan kebijakan tidak tepat sasaran.

• Pilihan Kebijakan

- ✓ Pengembangan Akses Pasar Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan;
Penyelenggaraan misi dagang dan temu bisnis antara pelaku usaha nasional dengan buyer di luar negeri dapat dilakukan dengan cara online maupun offline. Kerjasama lintas K/L untuk terus membuka pasar selain negara- negara yang sudah jalan perlu ditingkatkan bersama.
- ✓ Peningkatan Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Non Konsumsi;
Pemasaran produk perikanan tidak hanya berfokus pada produk Perikanan untuk konsumsi namun juga perlu juga dilakukan upaya peningkatan pemasaran produk Perikanan non

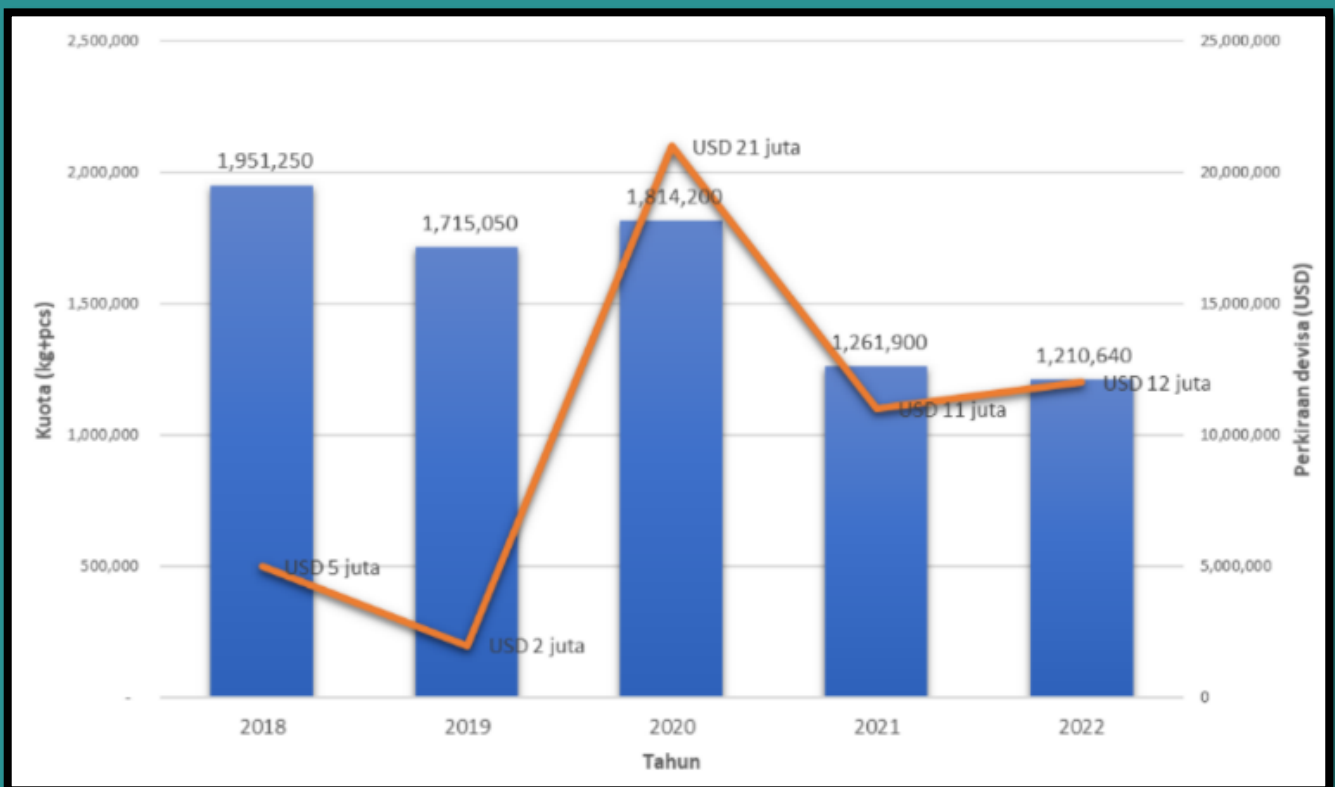
konsumsi seperti ikan hias dan koral Indonesia. Adapun kegiatan yang perlu di dorong dan dioptimalkan pemasaran ikan hias Indonesia di kancah internasional adalah pelaksanaan event NUSATIC (Nusantara Aquatic)

✓ Peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Indonesia

Tingkat permintaan masyarakat terhadap ikan dalam negeri dapat dicerminkan dari tinggi rendahnya tingkat konsumsi Masyarakat. Peningkatan angka konsumsi ikan disini terus di dorong dikarenakan dengan meningkatnya angka konsumsi ikan berarti pemasaran didalam negeri juga meningkat.

• **Capaian**

Indonesia memiliki potensi ikan hias sekitar 3.569 jenis ikan hias laut, 29 jenis endemik dan 83 jenis terancam punah. Sedikitnya terdapat 570 jenis ikan hias laut dan 500 jenis ikan hias air tawar yang diperdagangkan. Berikut merupakan data ekspor ikan hias pada tahun 2018-2022



Gambar 10 Data Ekspor Koral Hias 2018-2022

Berikut merupakan data yang memuat angka konsumsi ikan masyarakat

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian (kg/kapita)	50,69	52,65	54,56	55,37	59,33	56,48 (Okt)

Tabel 7 Angka Konsumsi Ikan Masyarakat

No	2018		2019		2020		2021		2022*	
	Eksportir	Nilai	Eksportir	Nilai	Eksportir	Nilai	Eksportir	Nilai	Eksportir	Nilai
1	China	22.4	China	20.8	China	19.2	China	22.1	China	23.5
2	Norway	12.0	Norway	12.0	Norway	11.1	Norway	13.9	Norway	15.6
3	Viet Nam	8.9	Viet Nam	8.7	Viet Nam	8.5	Viet Nam	9.1	Viet Nam	10.9
4	Chile	7.0	India	6.9	Chile	6.1	India	7.6	Ecuador	10.1
5	India	7.0	Chile	6.7	India	5.8	Canada	7.2	Chile	8.7
6	USA	6.3	USA	5.9	Thailand	5.7	Ecuador	7.1	Russian Fed	8.1
7	Thailand	6.0	Thailand	5.8	Ecuador	5.4	Chile	7.0	India	7.8
8	Canada	5.5	Canada	5.7	Indonesia	5.2	Russian Fed	6.1	Canada	6.6
9	Spain	5.2	Ecuador	5.5	USA	5.0	USA	5.9	Indonesia	6.2
10	Ecuador	4.9	Indonesia	4.9	Canada	4.9	Spain	5.8	USA	6.1
11	Sweden	4.8	Russian Fed	4.8	Russian Fed	4.9	Indonesia	5.7	Spain	6.0
12	Indonesia	4.8	Spain	4.8	Spain	4.7	Netherlands	5.4	Thailand	5.7
13	Netherlands	4.6	Netherlands	4.6	Netherlands	4.6	Thailand	5.4	Netherlands	5.5
14	Russian Fed	4.5	Sweden	4.5	Sweden	4.4	Sweden	4.8	Sweden	5.3
15	Denmark	4.1	Denmark	4.1	Denmark	4.2	Denmark	4.8	Denmark	4.8
	Others	58.4	Others	58.2	Others	53.9	Others	62.0	Others	63.8
	TOTAL	166.5		164.1		153.6		179.8		194.9

Sumber: ITC Trademap diolah Ditjen PDS-KKP diakses 4 Juli 2023 (39 kode HS 6 digit)

*) Angka sementara

Tabel 8 Peringkat Indonesia sebagai eksportir global mengalami peningkatan

1. Telah dilakukan Kunjungan Lapangan untuk Evalausi Pelaksanaan Nusatic 2023 dan Persiapan Nusatic 2024 sebagai upaya peningkatan Pemasaran Ikan Hias
2. Telah dilakukan kunjungan lapangan dilokasi Budidaya Korai
3. Telah dilakukan kegiatan peningkatan kerjasama Indonesia dan China melalui Program TCTP



- **Faktor Pendukung**

Komitmen kedua belah Pihak antara Indonesia dan China sangat berperan dalam kelancaran kerjasama ini

- **Kendala**

Masih Kurangnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi di antara ketiga pihak ini guna menciptakan ekosistem yang mendukung, inovatif, dan berkelanjutan demi mencapai tujuan bersama.

- **Tindak Lanjut**

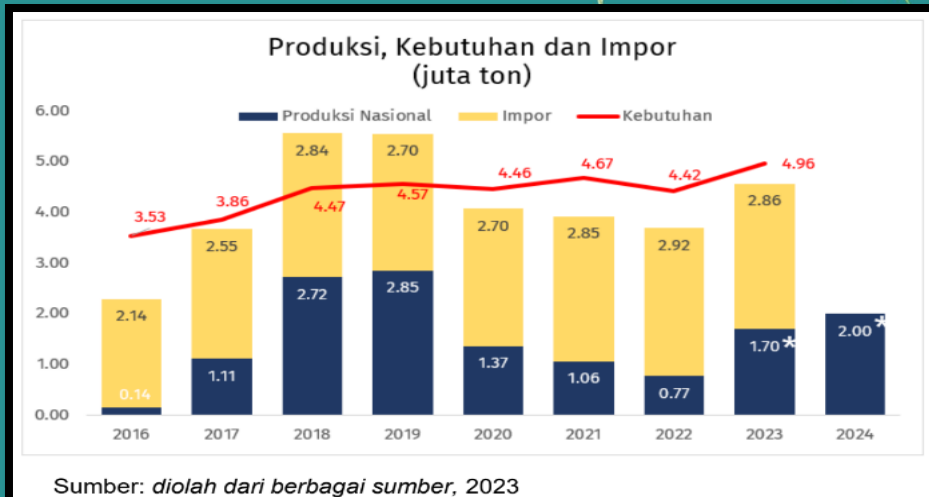
Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengembangkan produk-produk olahan ikan yang inovatif dan kreatif. Produk-produk ini kemudian dipasarkan ke berbagai negara di dunia, baik melalui saluran ekspor langsung maupun melalui distributor dan pengecer.

Selain itu juga perlu melakukan promosi produk kelautan dan perikanan secara aktif di berbagai negara di dunia. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti media konvensional, media digital, dan event-event internasional, serta insentif kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan diversifikasi produk. Insentif ini dapat berupa subsidi, kemudahan perizinan, dan pelatihan.

8. Rancangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

- **Isu Utama**

Terbitnya Perpres No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menjadi panduan bersama dalam implementasi pengembangan hulu-hilir bisnis proses pergaraman. Rencana aksi pada Perpres P3N ditetapkan untuk dilaksanakan selama 3 tahun terhitung sejak 2022-2024 sehingga implementasi terhadap rencana aksi menjadi tantangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab untuk dapat merealisasikan target/output capaian program dan kegiatan. Telah terbitnya beberapa peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana menjadi salah satu pendukung pelaksanaan rencana aksi, meskipun demikian masih diperlukan peraturan turunan lainnya baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana aksi P3N.



Grafik 2 produksi kebutuhan dan impor

Amanat hilirisasi pergaraman dan pemenuhan kebutuhan garam nasional dari produksi garam dalam negeri dapat dicapai apabila kondisi ketersediaan garam dengan kualitas sesuai kebutuhan pasar. Saat ini produksi garam dan kualitas garam tergantung oleh inovasi yang dikembangkan pada sektor pergaraman. Faktor pemanfaatan teknologi dan adanya inovasi berbasis teknologi yang mendukung optimalisasi produksi baik secara kuantitas maupun kualitas serta manajemen yang berkualitas pada industri pergaraman dirasa berperan dalam pengembangan sektor pergaraman nasional. Selain itu, bervariasinya tantangan implementasi pada masing-masing lokasi SEGAR (Sentra Ekonomi Garam Rakyat) turut berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian indikator produksi, kualitas dan penyerapan garam di SEGAR. Permasalahan pergaraman nasional dapat diidentifikasi secara umum sebagai berikut:

1. Perlunya peraturan turunan dari Perpres P3N dan pelaksanaannya untuk mendukung implementasi rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional
2. Perlunya optimalisasi hilirisasi industri pergaraman nasional untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan garam nasional



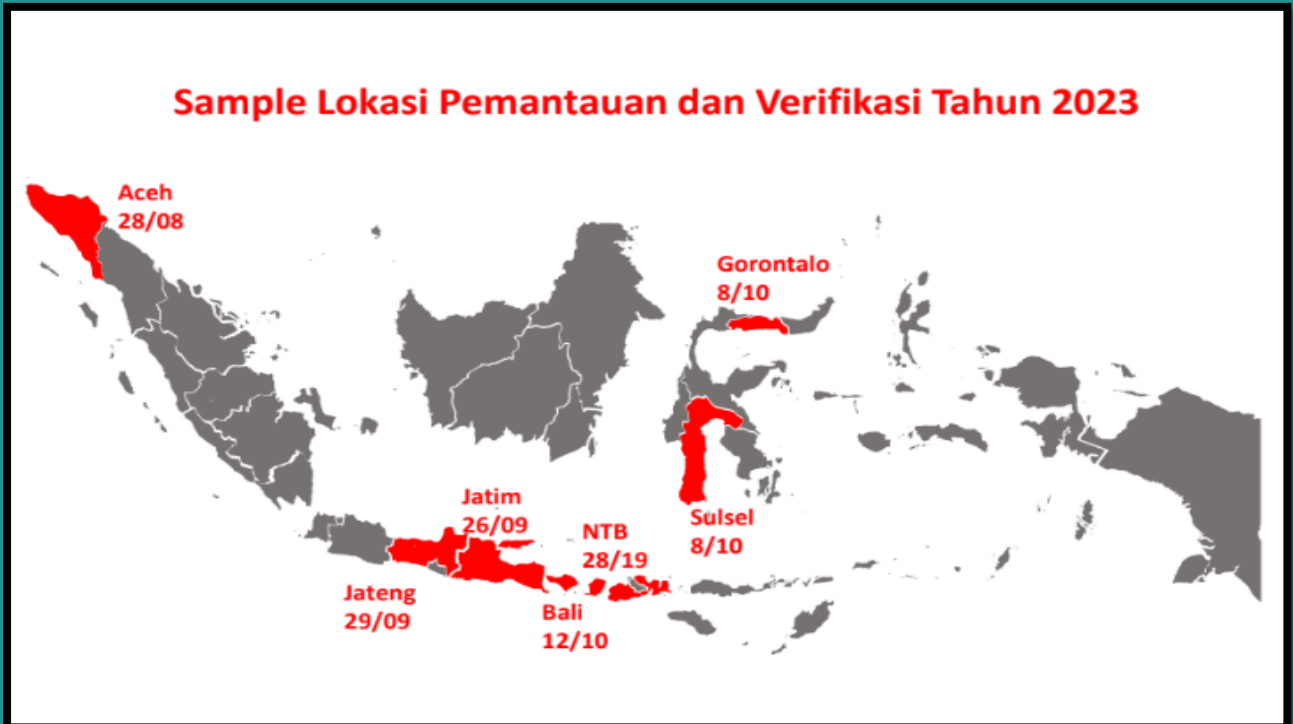
Gambar 11 Gambar Analisis faktor permasalahan pergaraman nasional dengan fishbone

• Pilihan Kebijakan

- ✓ Penataan dan Pelaksanaan peraturan turunan dari Perpres No. 126 tahun 2022
Terbitnya Perpres No.126 tahun 2022 mengamanatkan untuk Kementerian/Lembaga menyusun peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana. Pada tingkat daerah, provinsi yang telah ditetapkan menjadi SEGAR diamanatkan untuk menyusun Rencana Induk Pergaraman Daerah. Peraturan turunan yang disusun diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dalam mencapai target dan mendukung pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan.
- ✓ Optimalisasi industri pengolah berbasis kelembagaan ekonomi.
Penguatan inovasi sektor produksi dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam. Pemanfaatan teknologi perlu didorong untuk dapat terimplementasi pada level kelompok masyarakat hingga badan usaha.

- **Capaian**

Kegiatan Pemantauan, Verifikasi dan Evaluasi Tahun 2023



Jadwal dan Rencana Kegiatan

Kegiatan	Tanggal	Status
2023		
Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan P3N TW I dan II di Bogor	28 Agustus 2023	Terlaksana
Pemantauan dan Verifikasi P3N dengan metode sampling ke 7 lokasi SEGAR	September s.d. November 2023	Terlaksana
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan P3N di Marves (Lv. Eselon 1)	Pekan ke 3 Desember 2023	Rencana
2024		
Kompilasi Hasil Pelaksanaan Renaksi Masing-Masing K/L	Pekan ke 3 Desember – Pekan ke 1 Januari 2024	Rencana
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan P3N tahun 2023 (Level Eselon 1)	Pekan ke 2 Januari 2024	Rencana
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan P3N di Marves (Level Menteri)	Pekan ke 3 Januari 2024	Rencana
Laporan Pelaksanaan Tahun 2023 dari Menteri kepada Presiden	Pekan ke IV Januari 2024	Rencana

- ✓ Terbitnya Perpres No.126 tahun 2022 mengamanatkan untuk Kementerian/Lembaga menyusun peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana.
- ✓ Telah dilaksanakan serangkaian Pemantauan dan Verifikasi P3N dengan metode sampling ke 7 lokasi SEGAR pada Bulan September - November 2023, meliputi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan



- **Faktor Pendukung**

Dukungan pemerintah daerah dan K/L teknis terkait yang telah mendukung pelaksanaan Perpres P3N

- **Kendala**

Ketersediaan garam di pasar melalui rantai pasok yang saat ini terbentuk secara berdasarkan mekanisme konvensional. Keterbatasan pengolah garam sehingga penyerapan garam rakyat masih terpusat kepada beberapa industri besar yang menguasai sebagian besar pasar garam nasional.

- **Tindak Lanjut**

- ✓ **Optimalisasi**

1. Optimalisasi terhadap washing plan pengolahan pada sentra pergaraman untuk meningkatkan kualitas garam lokal
2. Scale up terhadap industri pilot project pabrik pengolahan garam untuk meningkatkan kuantitas produksi.
3. Busnies Matching antara kelompok masyarakat pelaku utama bisnis pergaraman dengan badan usaha

- ✓ **Dukungan regulasi daerah**

1. Asistensi dan pendampingan terhadap penyusunan rencana Induk untuk provinsi segar yang belum menyusun konsep Rencana Induk
2. Percepatan penetapan Rencana Induk Pergaraman Nasional masing-masing provinsi SEGAR bagi provinsi yang sedang berprogres.

9. Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan dan Jaminan Usaha

• Isu Utama

Fokus permasalahan yang akan diselesaikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- ✓ Permasalahan distribusi logistik perikanan saat ini adalah jumlah unit cold storage masih minim bahkan tidak tersedia dan mahal di area pelabuhan perikanan terutama pada daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di Wilayah Indonesia;
- ✓ Produk perikanan lokal masih banyak yang tidak memenuhi syarat ekspor dan salah satunya penyebabnya adalah mutu atau kualitas produk yang menurun dikarenakan kekurangan fasilitas cold storage maupun kontainer pendingin (reefer container) dalam proses pengangkutan;
- ✓ Keterbatasan pasokan listrik di remote area dan pulau terluar dengan potensi perikanan tinggi yang memerlukan pasokan energi alternatif, mobile dan portable cold storage dalamantisipasi produk musiman;
- ✓ Pada daerah-daerah terluar dan terpencil Indonesia yang merupakan wilayah penghasil sumber daya perikanan yang tinggi masih mengalami banyak kendala dalam distribusi logistik perikanan, selain keterbatasan media distribusi berpendingin, keterbatasan sumber energi listrik menjadi faktor permasalahan yang utama dimana pada wilayah tersebut belum terkoneksi dengan saluran listrik yang memadai sedangkan komoditas perikanan pasca penangkapan dan dalam proses distribusi sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut yaitu proses pembekuan untuk menjaga mutu dan kualitas ikan;
- ✓ Belum terintegrasinya pelabuhan perikanan dengan pelabuhan laut serta keterbatasan pelayanan moda transportasi dan penyedia jasa logistik pada masing-masing lokasi pendaratan ikan;
- ✓ Produk perikanan memiliki ciri khas yang mudah rusak yang sensitif terhadap suhu sehingga memerlukan penanganan khusus dalam mempertahankan kualitas pada rantai pasok dan distribusi. Kualitas produk perikanan yang menurun akan mempengaruhi harga jual yang murah;
- ✓ Berdasarkan data kebutuhan reefer container secara nasional, diperkirakan masih ada sekitar 40% potensi proyek ini, sehingga Kemenko Marves akan mendorong optimalisasi produksi reefer container buatan dalam negeri termasuk inovasi portable cold storage dengan sumber energi panel surya;

- ✓ Nilai TKDN portable cold storage mencapai 51.96% namun belum termasuk dengan mesin pendingin. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya industri dalam negeri yang mampu memproduksi material/ komponen mesin pendingin. Selanjutnya masih perlu sertifikasi TKDN untuk mesin pendingin yang terdapat pada portable cold storage;
- ✓ Peningkatan produksi dan pemanfaatan produk buatan dalam negeri akan meningkatkan kemandirian bangsa dan mengurangi ketergantungan pada barang impor yang berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian industri dalam negeri.

• Pilihan Kebijakan

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pemanfaatan portable cold storage dengan solar panel atau reefer container yang dapat diperuntukkan bagi kapal-kapal nelayan guna mendukung ketahanan mutu dan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta menjaga kualitas produk bagi pelaku usaha industri pengolahan produk perikanan, selanjutnya diharapkan untuk dapat segera melakukan uji coba pada cold storage PT Perindo di Muara Baru Jakarta utara tentunya dengan dukungan dan kolaborasi pemerintah, badan usaha/industri terutama pihak-pihak yang bertanda tangan pada Nota Kesepahaman;
- ✓ Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT Perikanan Indonesia (Perindo) dalam rangka pemanfaatan portable cold storage kapasitas 20 feet atau sesuai kapasitas yang dibutuhkan yang dapat digunakan pada unit cold storage PT Perindo yang tersebar di wilayah Indonesia serta wilayah lain yang membutuhkan khususnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

• Capaian



Gambar 12 Dukungan Pembangunan Portable Cold Storage dengan Sumber Energi Solar Panel



inovasi prototipe portable cold storage solar panel

CV. Delima Mandiri bersama PT. Gununges Tiga Belas yang merupakan anggota ARPI telah berhasil membuat inovasi prototipe portable cold storage solar panel dengan kapasitas 20 feet yang memiliki keunggulan lebih hemat energi dan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 51.96%.

Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Sumber Daya Alam didampingi dengan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim telah melakukan tindak lanjut rangkaian kegiatan tersebut melalui trilateral meeting dengan PT. Perindo dan ARPI di Kemenko Marves dengan hasil pembahasan berupa inisiatif rencana kerja sama melalui perjanjian kerja sama (PKS) dan rencana uji coba pemanfaatan inovasi prototipe portable cold storage solar panel di salah satu kawasan PT Perindo.

Prototipe portable cold storage dengan solar panel tersebut rencananya akan diujicobakan di PT. Perindo, tepatnya di Muara Baru, Jakarta Utara. Hal ini dimaksudkan untuk melihat terlebih dahulu keunggulan dari inovasi yang ditawarkan mengingat komponen biaya terbesar pengoperasian cold storage terletak pada biaya operasional (terutama listrik) yang digunakan. Kemenko Marves telah secara rutin melakukan monitoring terhadap penyusunan draf Nota Kesepahaman terkait kerja sama pembangunan dan pemanfaatan portable cold storage dengan solar panel buatan dalam negeri dan berkoordinasi dengan P3DN Kemenperin untuk tindak lanjut sertifikasi TKDN produk serta berkoordinasi dengan LKPP mengenai pendaftaran produk pada sistem e-katalog.


Adanya inovasi portable cold storage dengan sumber energi solar panel ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk menyimpan produk terutama pada musim produksi/ penangkapan ikan yang berlebih untuk menjaga kualitas sehingga berdampak pada kestabilan harga jual.

• Faktor Pendukung

Dengan adanya pembangunan portable cold storage menggunakan sumber energi panel surya untuk memenuhi kebutuhan atas keterbatasan sarana industri rantai dingin khususnya produk perikanan bagi seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah terluar dan terpencil baik untuk kebutuhan distribusi dan penyimpanan local maupun untuk kebutuhan ekspor.

• Kendala

- ✓ Terbatasnya ketersediaan sarana (cold storage) dan kontainer/ media berpendingin sebagai alat pendistribusian logistik khususnya yang bersifat portable untuk distribusi




produk perikanan dan agro-maritim lainnya dalam proses distribusi antar wilayah Indonesia khususnya daerah-daerah terluar dan terpencil;

- ✓ Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti, listrik, air bersih dan lainnya pada remote area dan pulau terluar yang memerlukan pasokan energi alternatif. Permasalahan ini masih banyak ditemui pada daerah potensi perikanan khususnya di Indonesia Timur;
- ✓ Mahalnya harga sewa cold storage/ reefer container; Cold storage/ reefer container yang selama ini digunakan oleh pelaku usaha rantai dingin di Indonesia didominasi oleh produk ekspor;
- ✓ Belum optimalnya produksi dan pemanfaatan produk cold storage/ reefer container buatan dalam negeri


• **Tindak Lanjut**

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pemanfaatan portable cold storage dengan solar panel atau reefer container yang dapat diperuntukkan bagi kapal-kapal nelayan guna mendukung ketahanan mutu dan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan serta menjaga kualitas produk bagi pelaku usaha industri pengolahan produk perikanan;
- 2) Dengan telah terbangunnya prototipe portable cold storage/ reefer container dengan solar panel, selanjutnya diharapkan untuk dapat segera melakukan uji coba pada cold storage PT Perindo di Muara Baru Jakarta utara tentunya dengan dukungan dan kolaborasi pemerintah, badan usaha/industri terutama pihak-pihak yang bertanda tangan pada Nota Kesepahaman;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta PT Perikanan Indonesia (Perindo) dalam rangka pemanfaatan portable cold storage kapasitas 20 feet atau sesuai kapasitas yang dibutuhkan yang dapat digunakan pada unit cold storage PT Perindo yang tersebar di wilayah Indonesia serta wilayah lain yang membutuhkan khususnya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);
- 4) Paralel dengan pelaksanaan uji coba pemanfaatan untuk portable cold storage/ reefer container dengan solar panel buatan dalam negeri kapasitas 20 feet, agar CV Delima Mandiri segera melakukan permohonan pengujian sertifikasi TKDN kepada P3DN Kementerian Perindustrian dan pendaftaran pada sistem e-katalog;
- 5) Dengan terbangunnya portable cold storage/ reefer container dengan solar panel buatan dalam negeri untuk mendukung sistem logistik perikanan domestik maupun ekspor perlu keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memperkuat sistem logistik perikanan yang terintegrasi untuk mempermudah distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra



industri melalui terpenuhinya kebutuhan kontainer berpendingin sebagai dukungan terhadap sistem rantai dingin perikanan Indonesia baik untuk kebutuhan nelayan lokal maupun pelaku usaha ekspor sektor kelautan dan perikanan untuk mengatasi kendala sistem rantai dingin perikanan Indonesia;

- 6) Selanjutnya peran Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan industri dalam negeri terkait sangat diperlukan juga untuk dapat memperkuat sistem distribusi logistik perikanan dan komoditas agro-maritim yang terintegrasi baik untuk distribusi antar wilayah di Indonesia maupun bagi kebutuhan ekspor;
- 7) Perlu segera dilakukan pembangunan portable cold storage dengan sumber energi panel surya yang saat ini sudah ada industri manufaktur dalam negeri yang dapat memproduksi produk tersebut yakni CV Delima Mandiri, hal ini sebagai hub dan pusat distribusi dan sebagai solusi atas keterbatasan pasokan listrik di remote area dan pulau terluar Indonesia yang memerlukan pasokan energi alternatif selanjutnya cold storage yang bersifat mobile dan portable sangat bermanfaat dalam mengantisipasi produk musiman;
- 8) PT Delima Mandiri diharapkan dapat segera melakukan uji coba pada produk portable cold storage dengan sumber energi panel surya, paralel dengan hal tersebut perlu dilakukan pendaftaran untuk sertifikasi TKDN dan pendaftaran penayangan produk pada e-katalog LKPP;
- 9) Perlu dilakukan koordinasi secara paralel dengan PT Perindo dalam rangka rencana pemanfaatan portable cold storage dengan sumber energi panel surya pada cold storage PT Perindo yang tersebar di wilayah Indonesia, sehingga perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu pada cold storage yang berada di Muara Baru Jakarta Utara, selanjutnya jika produk tersebut telah terkonfirmasi bekerja dengan baik sesuai standar yang diharapkan PT Perindo, maka dapat mempercepat proses uji coba di wilayah lain khususnya di Wilayah Indonesia Timur;
- 10) Dengan terbangunnya reefer container kapasitas 1 dan 5 ton serta 20 dan 40 feet yang telah diproduksi PT INKA (Persero) pada tahun 2022 serta dengan adanya inovasi portable cold storage dengan sumber energi panel surya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan kepemilikan reefer container impor bagi Shipping Line atau MLO asing yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Teknis lain yang membidangi isu dimaksud;
- 11) Dengan demikian secara tidak langsung kami mendukung peningkatan PDB Maritim dari sisi perhubungan, yakni dukungan terhadap sistem logistik perikanan dan komoditas agro-



maritim, dimana reefer container menjadi salah satu alternatif peningkatan mutu dan kualitas produk perikanan dan kelautan agar tetap segar dengan kualitas yang terjaga sampai dengan wilayah tujuan maupun dalam masa penyimpanan. Hal ini tentunya merupakan langkah konkrit pemerintah dalam menekan penggunaan barang impor dan meningkatkan kemandirian bangsa melalui pembangunan inovasi dan pemanfaatan produk buatan dalam negeri.

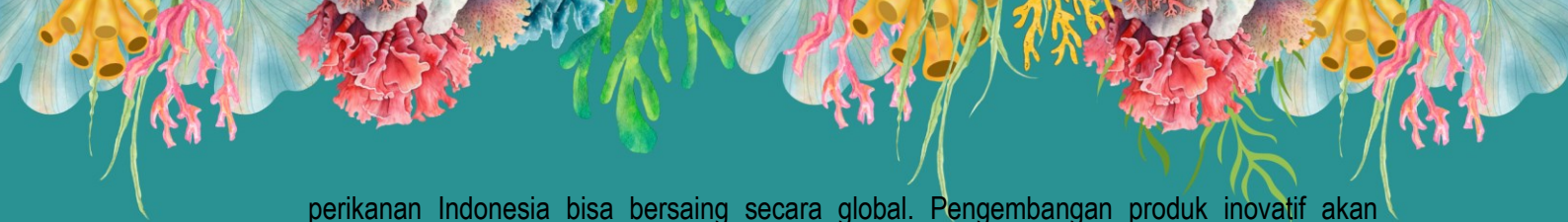
10. **Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Riset pada Sektor Kemaritiman**

• Isu Utama

Pengembangan industri kelautan dan perikanan membutuhkan faktor penunjang yang berkesinambungan baik pada hulu maupun hilirnya, agar dalam pelaksanaan pengembangannya dapat terjaga. Upaya untuk menunjang pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan riset dan teknologi, beriringan dengan pembangunan kapasitas SDM pada sektor kelautan dan perikanan. Pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi memerlukan peta jalan untuk mendukung riset nasional dalam jangka panjang yang dituangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045. Perencanaan riset secara nasional perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

• Pilihan Kebijakan

1. Penelitian tentang keberlanjutan lingkungan hidup di sektor kelautan dan perikanan
Kerja sama dapat difokuskan pada joint research yang mendukung keberlanjutan lingkungan dalam sektor kelautan dan perikanan yang didukung teknologi survei dan analisis data, termasuk studi tentang ekosistem pantai dan potensi laut dalam, perubahan iklim, dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Potensi pengembangan Ekonomi Biru sebagai salah satu fokus program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Pengembangan produk-produk inovatif yang dihasilkan dari sektor kelautan dan perikanan
Kolaborasi Pemerintah dengan berbagai stakeholder dapat mendorong pengembangan produk-produk baru dalam sektor kelautan dan perikanan, seperti makanan laut olahan, obat-obatan, atau bahan-bahan yang berasal dari laut. Ini melibatkan penelitian bahan baku baru dan teknik produksi yang efisien. Dengan inovasi, produk-produk dari sektor kelautan dan



perikanan Indonesia bisa bersaing secara global. Pengembangan produk inovatif akan membantu memperluas pangsa pasar dan menarik minat dari pasar internasional.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Kerja sama dapat mencakup pertukaran peneliti, ilmuwan, dan tenaga kerja terampil di bidang kelautan dan perikanan. Ini membantu dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan terbaru. Pendidikan dan pelatihan yang fokus pada sektor kelautan dan perikanan di Indonesia juga menjadi penting untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, terdidik, dan mampu beradaptasi dengan perubahan, sambil memastikan keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi biru.

4. Pembentukan Kemitraan Jangka Panjang:

Kemitraan jangka panjang yang kuat antara pemerintah Indonesia, pelaku industri lokal, dan negara asing/pihak internasional dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung riset, inovasi untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan penting dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan, serta kolaborasi pada sektor ini juga berguna untuk meningkatkan daya saing industri pada sektor kelautan dan perikanan.

• Capaian

ODA Project Cirebon

Project ODA ocean and coastal basic survey and capacity enhancement in Cirebon, Indonesia ini sedang on going dengan beberapa aktivitas/kegiatan yang dilakukan seperti Hibah peralatan riset, peningkatan kapasitas (survey dan analisis) serta program pelatihan. Salah satu output riset ini yaitu memberikan prediksi kondisi lingkungan dalam 10 – 20 tahun mendatang yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemerintah setempat.

Project ODA ocean and coastal basic survey and capacity enhancement in Cirebon, Indonesia akan berakhir pada bulan Agustus 2023, namun dari sisi Implementing Arrangement akan berakhir setelah 6 (enam) bulan proyek berakhir (Februari 2024). Sebelum proyek berakhir, Pemerintah Korea akan menghibahkan 8 set peralatan riset pada bulan Agustus 2023. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah penyiapan perubahan/penyesuaian addendum implementing arrangement bersama Biro Umum dan Biro Hukum, Kemenko Marves, Kemenlu dan Kemenkeu serta ITB (untuk proses impor, BAP, BAST dan BASTO). Berkoordinasi dengan stakeholders untuk mengawal sustainabilitas pemanfaatan peralatan riset ODA Cirebon pada ODA Intergrated Capacity Building dan ODA lainnya. Pengawasan penyiapan laporan akhir project dan pelaporan akhir hibah.



ODA project pemanfaatan satelit Korea GEOKompstat 2B:

Bulan Juni 2023 telah diadakan pertemuan dengan Direktur National Ocean Satellite Center (NOSC) - Korean Hydrographic and Oceanographic Agency (KHOA), bersama MTCRC, Korean Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) dan Green Blue di Korea. Dalam kesempatan ini terdapat kesepakatan untuk melanjutkan project dan segera bertandatangan IA. Dikesempatan ini, pihak Kemenko Marves meng-highlight tentang implementasi project ini bersama MTCRC sebagai intergovernmental agency, dan menjelaskan beberapa hal agar project smoothly implemented. Secara terpisah setelah rapat bersama Kemenko Marves di poin 1, Direktur MTCRC melanjutkan pertemuan bersama Direktur NOSC, untuk memperjelas posisi MTCRC sebagai lembaga intergovernmental. Delay dalam IA dan pelaksanaan dikarenakan ada perubahan yg disebabkan mekanisme lelang project tahunan di Korea. Pelaksana project tahun ini di lead oleh greenblue inc, dan ada konsorsium bersama KIOST dalam pelaksanaan project. Telah dilakukan pertemuan dengan perwakilan yang ditunjuk greenblue di Indonesia, dan CEO greenblue di Korea.

Dokumen Implementing Arrangement (IA) ODA project satelit yang baru ditandatangani pada bulan September 2023 telah mengalami keterlambatan dari timeline project. Keterlambatan ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Dalam rangka melakukan percepatan implementasi proyek sesuai dengan jadwal yang direncanakan pada IA, maka diperlukan beberapa langkah strategis dan koordinasi dengan mitra pelaksana teknis di Indonesia.

• Faktor Pendukung

Komitmen pimpinan unit kerja dan seluruh stakeholder dalam melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masing-masing project

• Kendala

- ✓ Untuk ODA Project Cirebon dan ODA Peningkatan Kapasitas SDM tidak ditemukan kendala berarti dalam penyelesaian project.
- ✓ ODA Project satelit memiliki kendala dalam menentukan K/L sebagai mitra teknis dari sisi Indonesia dalam menjalankan proyek



- **Tindak Lanjut**


- ✓ ODA Project Cirebon pada tahun 2024 akan berakhir, sehingga direncanakan pengecekan akhir atas barang-barang hibah, skema penggunaan barang riset hibah dan aset-aset yang ada.
- ✓ ODA Project Satelit yang lainnya sudah ditandatangani oleh Kemenko Marves mewakili pemerintah Indonesia akan segera melakukan koordinasi untuk menemukan mitra strategis (K/L teknis) yang sesuai untuk implementasi proyek. Selanjutnya barang hibah tahap I yang sudah masuk, akan di register oleh K/L teknis yang nantinya menjadi mitra dalam implementasi proyek.
- ✓ ODA proyek peningkatan kapasitas SDM sudah dimulai pada tahun ini, BPPSDM KKP menjadi salah satu mitra yang akan bertandatangan dari sisi Pemerintah Indonesia. Selanjutnya akan diadakan rapat koordinasi pembahasan dokumen Implementing Arrangement (IA) sebagai dokumen turunan atas MOU antara BPPSDM KKP dan MTCRC yang sudah ditandatangani sebelumnya dan juga sekaligus sebagai pengaturan teknis terkait implementasi proyek selama 5 tahun kedepannya.

11. Rancangan Kebijakan Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan

- **Isu Utama**

Dalam Prioritas Nasional untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun sembilan Major Project (MP) sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga proyek dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa fokus yaitu, urgensi, impact/outcome, output, pelaksana, lokasi, highlight proyek, dan sumber pendanaan. Dua dari Sembilan MP tersebut menjadi tanggung jawab koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, yaitu **(1) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional, dan (2) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.** Hal yang mendasari perlunya integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional adalah masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, jaringan sistem pemasaran produk perikanan Internasional belum memiliki, dukungan infrastruktur produksi belum optimal, dan tata kelola Perikanan yang masih harus ditingkatkan.

Dalam rangka merevitalisasi tambak di Kawasan sentra produksi udang dan bandeng, tujuan utama penanganan Major Project ini adalah agar Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama Udang dunia dimana saat ini Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga.



Hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya pemanfaatan lahan budidaya air payau yang baru sekitar 715.000 hektar (24%) dari potensi lahan yang mencapai yang seluas 2,9 juta hektar, dimana luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 60% merupakan tambak tradisional. Oleh karena itu, upaya – upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5% per tahun serta meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun.

- **Pilihan Kebijakan**

- ✓ **Koordinasi Efektifitas Kemudahan Perizinan**

Dengan memastikan kemudahan dalam perizinan di pelabuhan perikanan, para petani tambak dapat lebih cepat mengakses izin yang diperlukan untuk memulai atau memperluas usaha mereka. Ini akan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses pengembangan tambak, memungkinkan mereka fokus pada aspek produksi dan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan hasil panen.

- ✓ **Peningkatan Teknologi dan Kapasitas SDM**

Peningkatan teknologi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan revitalisasi akan membuka jalan bagi efisiensi yang lebih besar dalam proses distribusi hasil tangkapan dan produksi. Dengan pemanfaatan sistem monitoring yang canggih, perencanaan logistik yang lebih baik, dan integrasi teknologi informasi, pengelolaan pelabuhan perikanan dan revitalisasi tambak dapat menjadi hal yang efisien dalam mendukung kegiatan ekonomi di sekitarnya.

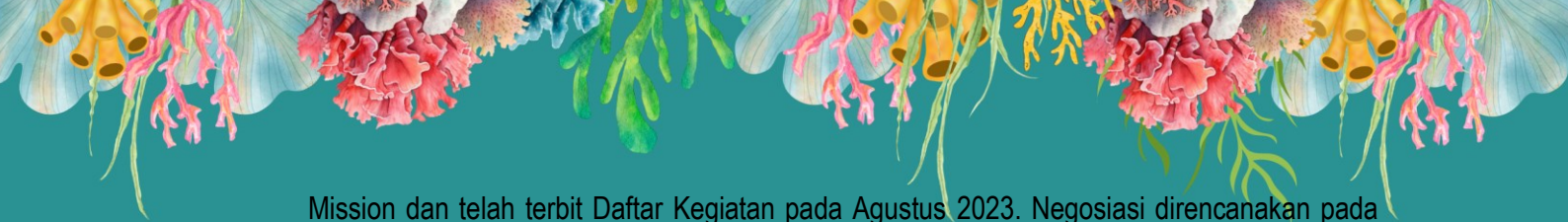
- ✓ **Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dengan Menerapkan praktik ramah lingkungan dan memonitor dampak lingkungan dari kegiatan operasional.**

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan industri perikanan. Melalui penerapan praktik ramah lingkungan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan operasional, upaya ini akan memastikan bahwa pertumbuhan industri dapat berjalan sejalan dengan keseimbangan ekosistem.

- **Capaian**

- ✓ Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional (IFP IFM) merupakan salah satu Major Project yang mendukung Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam RPJMN 2020-2024, khususnya terkait peningkatan produktivitas dan standarisasi produk perikanan tangkap. Hingga 2024, target terbangunnya IFP IFM adalah sebanyak 3 lokasi, yaitu di Likupang, Bagansiapi-api dan Maluku.

- ✓ Terdapat proyek PHLN IFP IFM Phase I melalui pendanaan JICA untuk pembangunan Pelabuhan dan pasar ikan di Likupang dan Bagansiapi-api. JICA telah melakukan Appraisal



Mission dan telah terbit Daftar Kegiatan pada Agustus 2023. Negosiasi direncanakan pada akhir 2023, dilanjutkan dengan implementasi tahun 2024.

- ✓ Adapun untuk lokasi Maluku, KKP mengajukan penambahan lokasi PPN Ambon untuk dikembangkan melalui proyek PHLN IFP IFM Phase II dengan pendanaan ADB. Saat ini ADB sedang melakukan Fact-finding Mission untuk mendiskusikan usulan tersebut
- ✓ Selain 3 lokasi pelabuhan perikanan dalam target RPJMN, KKP juga melakukan sinergi pendanaan pada lokasi SKPT (Sabang, Moa, Saumlaki dan Morotai), Eco Fishing Port (Bitung, Kendari, Belawan dan Cilacap), dan IFP IFM dengan lebih banyak lokasi. Pada IFP IFM Phase I dilakukan dengan pendanaan IDB (Pengembangan dan Kejawanan), JICA (Natuna, Likupang, Merauke, Lampulo, Pekalongan dan Bagansiapi-api). Pada IFP IFM Phase II dilakukan dengan pendanaan ADB (Bungus, Teluk Awang, Mansapa, Bolok, Depapre, Tegalsari, Ambon), AFD (Cilacap, Pelabuhan Ratu), IsDN (Tual, Batu duyung, Munsang dan Paumako).
- ✓ Terkait pelaksanaan revitalisasi kawasan tambak, hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah terkait penguatan kelembagaan PITAP, koordinasi penyederhanaan perizinan dan kondisi permasalahan pengembangan pertambakan udang dan monitoring proses implementasi penyederhanaan perizinan usaha pertambakan udang di provinsi Jawa Timur.

• **Faktor Pendukung**

koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, petani tambak, dan pelaku industri perikanan, dapat terwujudnya sinergi yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.


• **Kendala**

- ✓ ***Koordinasi penyederhanaan perizinan dan kondisi permasalahan pengembangan pertambakan udang***

Hal yang menjadi kendala baik yang diidentifikasi di lapangan dan pembahasan bersama multi-stakeholder adalah Program Pusat yang diterbitkan tidak berkelanjutan karena tidak adanya anggaran dan anggaran UPT terkunci pada sektor benih dan calon induk sehingga untuk melakukan operasional MSF akan menjadi sulit/berat.

- ✓ ***Monitoring proses implementasi penyederhanaan perizinan usaha pertambakan udang di provinsi Jawa Timur***

1. Implementasi OSS dinilai masih banyak kelemahan. Indikator resiko dengan menggunakan nominal investasi sebagai parameter dinilai tidak terlalu efektif. Dilapangan, banyak usaha – usaha dengan investasi rendah justru memiliki resiko yang lebih tinggi;

- 
2. Terkait ijin lingkungan yang menggunakan self declare dinilai memiliki kelemahan. Seharusnya perlu ada verifikasi mendetail di lapangan oleh pengawas terkait self declare tersebut. Secara fakta di lapangan ditemukan banyak penyalahgunaan;
 3. Terkait dengan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) banyak konflik antara Pemda dengan LSM. Seringkali LSM menolak usaha – usaha tertentu karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekalipun usaha tersebut berdasarkan tata ruang sudah sesuai;
 4. Petembak menilai bahwa proses perizinan untuk kegiatan pertambakan udang seringkali rumit/bermasalah. Sekalipun sudah dilakukan penyederhanaan, namun di lapangan proses tersebut dinilai belum sederhana. Pemerintah pusat (KKP dikoordinasikan oleh Kemenko Marves) perlu sosialisasi hasil penyederhanaan perizinan tersebut dengan lebih luas;
 5. Proses izin yang berjalan saat ini juga butuh waktu yang relatif lama, banyak proses yang justru melebihi SLA;
 6. Proses izin yang terlalu rumit, sebagian petambak meminta bantuan konsultan. Namun, konsultan justru memasang harga yang relatif tinggi. Hal ini sangat menyulitkan. Harga tinggi tersebut merupakan implikasi dari ijin – ijin yang relatif banyak dan berbelit;
 7. Banyak LSM yang masih mengganggu kegiatan pertambakan sekalipun izin untuk berusaha sudah lengkap;
 8. Penegakan hukum yang tidak tepat di lapangan dinilai masih sering terjadi. Pemerintah perlu mendetailkan setiap izin kegiatan namun tanpa memperbanyak izin yang sudah ada. Dengan izin yang lebih detail dan lengkap, diharapkan bisa menutup celah oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab;

• **Tindak Lanjut**

1. Koordinasi Efektifitas Kemudahan Perizinan

Dengan memastikan kemudahan dalam perizinan di pelabuhan perikanan, para petani tambak dapat lebih cepat mengakses izin yang diperlukan untuk memulai atau memperluas usaha mereka. Ini akan mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses pengembangan tambak, memungkinkan mereka fokus pada aspek produksi dan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan hasil panen.

2. Peningkatan Teknologi dan Kapasitas SDM


Peningkatan teknologi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan revitalisasi akan membuka jalan bagi efisiensi yang lebih besar dalam proses distribusi hasil tangkapan dan produksi. Dengan pemanfaatan sistem monitoring yang canggih, perencanaan logistik yang

lebih baik, dan integrasi teknologi informasi, pengelolaan pelabuhan perikanan dan revitalisasi tambak dapat menjadi hal yang

4. Indikator Kinerja 4 adalah “**Persentase isu-isu Strategis yang Diselesaikan**”

IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
Persentase isu-isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100.00%	0.2	0.11111	0.11111	Immediate outcome

No	Isu Strategis	Kriteria Keberhasilan
1	Koordinasi Penyelesaian Rencana Zonasi	Mendorong terbitnya Perda RTRWP dan/atau Perpres RTR KSN/RZKAW
2	Koordinasi Pelaksanaan Blue Halo S	Mendorong terselesainya Studi Pendahuluan untuk Pendanaan Blue Halo S
3	Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara	Mendorong Penyelesaian Pembangunan Ibu Kota Sofifi
4	Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang	Ditindaklanjutinya Kegiatan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang
5	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Produk KP ke China	Terselesainya kendala ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Tiongkok
6	Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX	Ditindaklanjutinya Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX
7	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20	Didorongnya Kerja Sama Ocean 20 sebagai Forum Kelautan Global G20
8	Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksanakannya rekonsiliasi data sehingga Satgas memiliki 1 database yang menjadi acuan 2. Terlaksanakannya Self Reporting 3. Upaya implementasi UUCK Pasal 110A dan 110B
9	Koordinasi Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)	Mendorong Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)



Kriteria keberhasilan tersebut dipecah menjadi target-target sebagai output antara yang dicapai setiap triwulannya. Berikut adalah capaian dari pelaksanaan isu strategis Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2023

a. Koordinasi Penyelesaian Rencana Zonasi

Telah tersusunnya Perpres dan Perda dengan rincian sebagai berikut :

1. Perpres No 29 Tahun 2023

Rencana Struktur Ruang pada Ranperda RTRWP NTB agar dapat mengakomodir Rencana Struktur Ruang Alur Migrasi Biota yang telah ditetapkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores.

2. Perpres No 30 Tahun 2023

3. Perda RTRWP Sulawesi tengah 1 Tahun 2023

4. Perda RTRWP Kalimantan Selatan 6 Tahun 2023

5. Perda RTRWP Kalimantan Timur No 1 Tahun 2023


6. Perda RTRWP Jambi No 7 Tahun 2023

7. Perda RTRWP Bengkulu 3 Tahun 2023

Koordinasi yang intens dan proses perbaikan RPerpres RZKAW Laut Flores dan RZKAW Selat Malaka yang cepat dilakukan oleh KKP dengan mengakomodir masukan dari K/L membuat proses penetapan kedua Perpres tersebut menjadi lebih cepat.

Bentuk dari peran Marves dalam koordinasi penyelesaian Rencana Zonasi adalah memberikan masukan tertulis kepada wilayah terkait, dengan rincian sebagai berikut :

1. Masukan Tertulis (RTRW) Provinsi Bengkulu dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Masukan Tertulis terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (RTR KSN BBK)
3. Masukan Tertulis Ranperda RTRWP Sulawesi Tenggara
4. Masukan Tertulis Ranperda RTRWP Nusa Tenggara Barat
5. Masukan Tertulis terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa Bali dan Nusatenggara
6. Masukan Tertulis terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda
7. Masukan Tertulis terhadap Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Utara

- 
8. Masukan Tertulis terhadap Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur
 9. Masukan Tertulis terhadap Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Utara
 10. Masukan Tertulis terhadap Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Kalimantan Selatan

Dan telah dilakukan paraf ulang pada naskah berikut :

1. B1651 RZKAW Laut Flores dan Selat Malaka
2. B0526 RZKAW Laut Flores dan selat malaka

sebagai bentuk tindak lanjut Perlu dibuat matriks kompatibilitas pola ruang di wilayah pantai/pesisir antara darat dan laut dengan cara menyandingkan pola ruang darat dan laut serta menyandingkan kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan pada masing-masing zona untuk melihat apakah ada potensi konflik pemanfaatan. Perlu dicermati kembali apakah Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah sesuai pola ruangnya dan jika belum maka perlu dimitigasi potensi konflik yang mungkin nanti akan terjadi dalam narasi Indikasi Arahan Zonasi.

b. Koordinasi Pelaksanaan Blue Halo S

Blue Halo S adalah sebuah pendekatan pengelolaan terpadu konservasi perairan dan perikanan yang memperkuat hubungan ekologis dan ekonomi antara proteksi laut dan produksi. Melalui inisiatif Blue Halo S, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan target perlindungan laut dan produksi berkelanjutan. Blue Halo S mempromosikan pembiayaan berkelanjutan untuk tujuan perlindungan, pemulihan dan rehabilitasi menuju karbon biru.

Keselarasan Blue Halo S dengan Program Pemerintah


➤ RPJPN 2025 – 2045

Pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, bioekonomi untuk Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

➤ Nationally Determined Contribution (NDC)

Mitigasi: target penurunan emisi GRK tahun 2030 (31,89% dengan upaya sendiri; 43,20% dengan bantuan internasional Adaptasi: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial & sumber penghidupan, ketahanan ekosistem & lanskap

➤ Lima program prioritas KKP

- 
- 1) Perluasan MPA;
 - 2) Penangkapan Ikan Terukur;
 - 3) Budidaya Laut Berkelanjutan;
 - 4) Pengelolaan Kawasan Pesisir & Pulau-pulau Kecil;
 - 5) Pengelolaan Sampah Plastik

➤ **Rencana Strategis Kemenko Marves**

- 1) Peningkatan SDM;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

Berikut merupakan capaian Kemenko Marves :

1. Kemenko Marves akan menjadi ketua komite pengarah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan bertugas sebagai ketua komite teknis dalam program Blue Halo S dengan anggota dari beberapa K/L terkait seperti Kementerian Kehutanan (KLHK), Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan pemerintah provinsi WPP 572.
2. Telah disusunnya Desain Mekanisme Adaptasi Blue Halo S dengan rincian sebagai berikut :

Rancangan Kemitraan Pusat, Daerah Dan Mitra Pembangun

Proyek Blue Halo S dirancang untuk secara khusus menangani faktor-faktor pendukung (pembatas) utama yang terkait dengan mobilisasi pembiayaan dan investasi dalam pembangunan laut dan pesisir yang berkelanjutan, inklusif, dan tahan iklim. Proyek ini berakar pada pendekatan manajemen laut terintegrasi baru yang menghubungkan perlindungan ekosistem laut yang efektif dengan produksi, dan pembangunan berkelanjutan sumber daya laut dan berusaha mendukung kemajuan melalui mobilisasi pendanaan untuk sains dan data kritis, manajemen ekosistem kritis yang berkelanjutan, dukungan untuk nelayan dan masyarakat skala kecil dan untuk meningkatkan ketahanan di wilayah laut. Dalam melaksanakan program Blue Halo S diperlukan suatu kemitraan antara pusat, daerah dan mitra pembangunan. Kemitraan stakeholder dapat dibentuk dalam suatu komite teknis. Adapun tujuan dari dibentuknya komite teknis adalah memberikan arahan strategis dan memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait pada proses desain proposal pembiayaan Blue Halo S.

Pembentukan Tim Teknis Dan Analisis Konstektual Proyek

Komite teknis secara eksplisit keanggotaannya terdapat pada unit Eselon II setiap kementerian/Lembaga yang terkait. Meskipun dalam penugasannya sesuai kebijakan masing-masing pihak. Komitmen dari seluruh unit Eselon II sebagai anggota komite teknis sangat diperlukan, mengingat inisiasi ini mendukung sustainable blue economy. Dalam tahap desain, pihak yang terlibat di antaranya Pemerintah Indonesia yang tergabung dalam Komite Teknis serta mitra kerja yang terkait sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 13 Pemetaan Tim Teknis

Analisis Kerentanan Iklim, Sumber Daya Alam, Ekosistem Dan Profil Emisi

Selama 20 tahun ke depan, beberapa provinsi di WPP 572 akan mengalami rata-rata anomali temperatur dan curah hujan yang besar. Hasil ansamble multi model awal yang dikembangkan menunjukkan tren iklim panas dan lembab di area WPP 572 dengan peningkatan suhu rata-rata tahunan dan penurunan curah hujan yang kemungkinan besar terjadi di seluruh wilayah antara 2021-2040. Dampak perubahan iklim kemungkinan besar akan mempengaruhi sumber daya alam WPP 572 dengan mengubah distribusi, jumlah (kelimpahan) dan ukuran sumber daya. Sehingga diperlukan kajian kerentanan perubahan iklim, sumber daya alam, dan ekosistem dan profil emisi. Adapun hasil keluaran yang diperoleh diantaranya:

- ✓ Analisis proyeksi iklim global & regional, identifikasi kapasitas dan ketahanan adaptasi setempat, identifikasi prioritas aksi adaptasi;
- ✓ Analisis (stocktaking ecosystem services, identifikasi impact drivers (legal & illegal), actor mapping, monetisasi services);
- ✓ Analisis baseline emisi GRK, analisis potensi serapan karbon, analisis profil emisi GRK dan kaitannya dengan kriteria investasi dalam BEAM

Desain Mekanisme Adaptasi Blue Halo S

Desain mekanisme adaptasi Blue Halo S dibagi menjadi 2 komponen yakni kondisi pendukung/enabling conditions dan fasilitas pendanaan berbasis hibah. Kondisi pendukung Blue Halo S adalah penguatan investasi biru dalam proteksi-produksi berkelanjutan di WPP 572. Adapun outputnya adalah:

1. Instrumen keuangan inovatif untuk keberlanjutan perlindungan ekosistem laut yang didukung oleh kerangka kebijakan, regulasi di Tingkat nasional dan daerah untuk memfasilitasi investasi biru di WPP 572
2. Tersedianya penelitian ekosistem laut dan pesisir serta data perikanan untuk memperkuat pengelolaan proteksi-produksi dan kebijakan berbasis bukti di WPP 572
3. Tersedianya kapasitas dan akses untuk mendukung ekonomi biru berorientasi pasar dan intensif perlindungan ekosistem berserta perikanan berkelanjutan di WPP 572.

Komponen ini memiliki keterkaitan dengan agenda prioritas KKP berupa perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan serta pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil. Komponen 2 adalah fasilitas hibah adaptasi ekosistem biru untuk mendukung adaptasi perubahan iklim, mitigasi dan kegiatan ekonomi biru di WPP 572. Adapun outputnya adalah:


1. Masyarakat pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim mengadopsi dan menerapkan intervensi adaptasi perubahan iklim
2. Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem biru dan adopsi aplikasi energi terbarukan
3. Meningkatnya kesiapan intervensi untuk mitra usaha ekonomi biru

Namun dalam progresnya terdapat beberapa kendala yaitu :

- ✓ WPP 572 memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana:
- ✓ Degradasi ekosistem pesisir dan laut
- ✓ Stok ikan yang menipis

Berikut merupakan beberapa kegiatan sikondal yang dilakukan selama tahun 2023 :

- ✓ Lokakarya 3 Agustus 2023
- ✓ Telah dilaksanakan koordinasi Blue Halo S pada 9,10,30 Oktober, 14 November ,6 & 18 Desember 2023.

- 
- ✓ Telah dilaksanakan Pembahasan Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Blue Halo S pada 10 Oktober 2023.
 - ✓ Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal pada tanggal 1 November 2023
 - ✓ Telah dilaksanakan Rapat Konsultatif dan Permohonan Penyediaan Data terkait Identifikasi Proyek Potensial dan Prioritas Investasi di WPPNRI 572 pada tanggal 23 & 24 Oktober 2023

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan kedepannya


- ✓ Berkoordinasi dengan Bappenas untuk memasukkan program Blue Halo S masuk dalam perencanaan sehingga memungkinkan dilakukan tagging dalam kegiatan di K/L;
- ✓ Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kerjasama yang akan dilakukan dengan menggunakan CI;
- ✓ Proses submit proposal Blue Halo S dapat dilanjutkan kepada Badan Kebijakan Fiskal selaku NDA GCF.

c. Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara

Pembangunan Kota Baru Sofifi telah menjadi salah satu agenda prioritas nasional sejak RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 (Major Project), dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam memantau perkembangan pembangunan Ibukota Sofifi yang telah dilaksanakan selama 2023 adalah:

1. Pembahasan rencana pembangunan Rusun ASN/TNI/POLRI meliputi penyediaan lahan dan kepastian anggaran on top pada tanggal 9 Januari 2023.
2. Surat Menko Marves kepada Menteri Keuangan dan Menteri PUPR dalam hal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Sofifi, Ibukota Maluku Utara melalui Skema On Top Tahun 2023-2024 dan Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Sofifi, Ibukota Maluku Utara tanggal 11 Januari 2023.
3. Multilateral Meeting (Direktorat Pembangunan Daerah) untuk konfirmasi dukungan RO 2023-2024 pada tanggal 21 Februari 2023
4. Rakor (Kemenko Ekon) dan evaluasi pembangunan Kota Baru serta konfirmasi dukungan RO dan anggaran on top pada tanggal 22 Februari 2023.

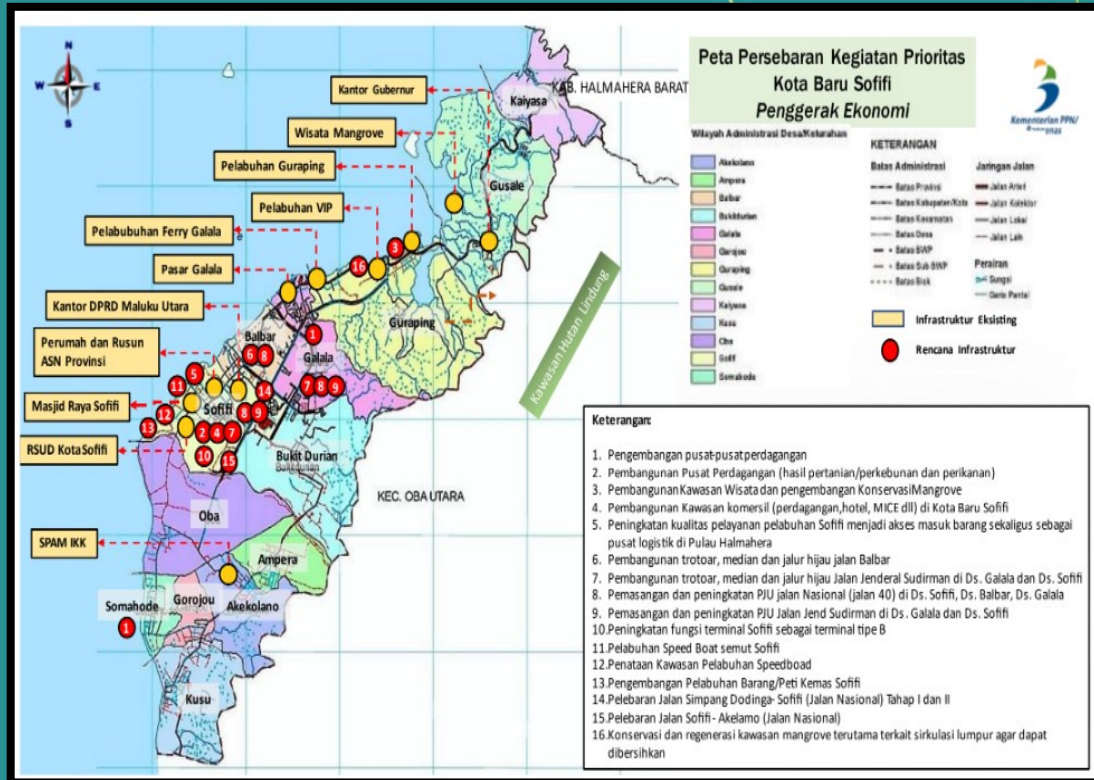
- 
5. Rakor (Kemenko Ekon) untuk konfirmasi kemajuan 54 prioritas program pada tanggal 8 Maret 2023.
 6. Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Sofifi pada tanggal 11 Mei 2023.
 7. Multilateral Meeting Pembahasan Kemajuan 54 Program Prioritas di Sofifi pada tanggal 1 Agustus 2023.
 8. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Prioritas Pembangunan Kota Baru Sofifi 30 Agustus 2023.
 9. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembangunan Kota Baru Sofifi 21 Desember 2023.

Berikut merupakan beberapa capaian progres dalam proses pelaksanaan pembangunan ibukota sofifi :

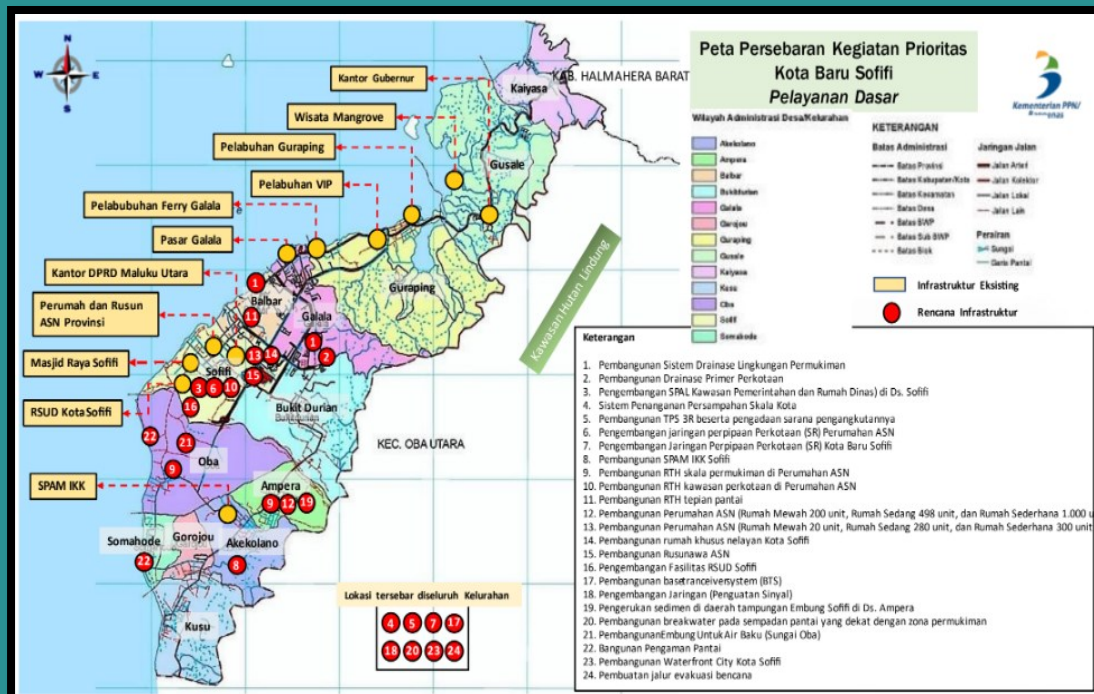
1. Lanjutan Pembangunan Kantor BPTD Maluku Utara
Penahapan pembangunan kantor mulai dari 2021-2023 dan di tahun 2024 diusulkan untuk pembangunan Rumah Dinas/Mess Pegawai.
2. Pembangunan Gedung Kantor BPKP
Pembangunan Gedung Kantor BPKP sudah dimulai dari tahun 2021, saat ini sedang masuk dalam tahap pembangunan fondasi. Untuk tahun 2023 sudah masuk dalam anggaran DIPA.
3. Desain Rehabilitasi Embung Sofifi
4. Pembangunan Dermaga Sandar Pelabuhan Sofifi (pelabuhan penumpang dan barang)
Saat ini masih dalam proses reviu Rencana Induk Pelabuhan (RIP), DED dan menunggu serah terima lahan ex darko untuk pemenuhan RC nya

Terdapat 54 program prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Sofifi yang akan dilakukan baik oleh K/L pusat dan pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa kendala seperti belum masuknya program rencana anggaran di 2024 oleh beberapa K/L dan kurangnya koordinasi terhadap perencanaan program.

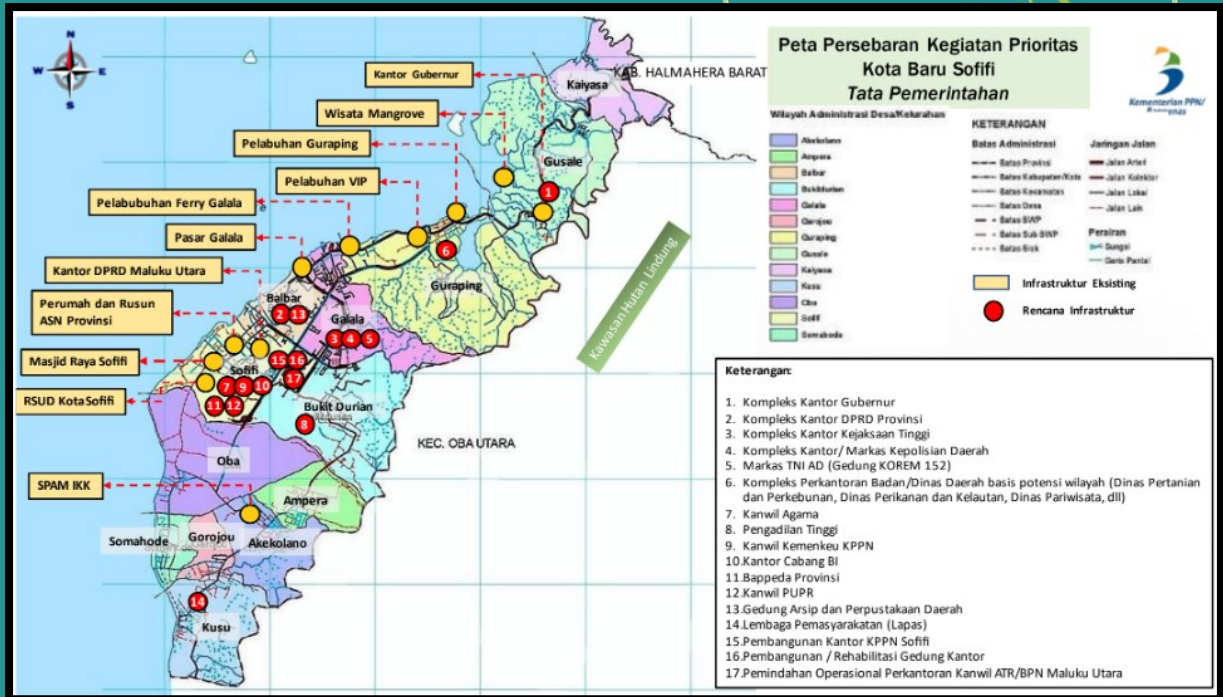
Sebagai tindak lanjut Perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program prioritas pembangunan Ibu Kota Sofifi untuk menyamakan kembali persepsi dalam pelaksanaan Major Project 2020-2024 dan menyelesaikan kendala-kendala yang menghambat.



Gambar 14 Peta Persebaran Kegiatan Prioritas Kota Baru Sofifi Pergerakan Ekonomi



Gambar 15 peta persebaran Kegiatan Prioritas Kota Baru Sofifi Pelayanan dasar




Gambar 16 peta persebaran kegiatan prioritas kota baru sofifi tata pemerintahan

d. Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang

Komoditas Udang merupakan komoditas strategis perikanan yang berkontribusi utama sebagai sumber pangan (53 % dari konsumsi protein hewani berasal dari ikan); sebagai lapangan pekerjaan (2,2 juta orang pembudidaya terdiri dari 401.801 orang budidaya payau); serta sumber devisa ekspor (49 % dari nilai ekspor perikanan). Dengan keberadaan lahan pesisir yang sangat panjang didukung oleh iklim yang cocok untuk budidaya pantai (coastal aquaculture), maka selanjutnya pemerintah mampu untuk terus meningkatkan kontribusi ekonomi wilayah pesisir ini melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan laut dan payau, termasuk budidaya tambak yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu bentuk capaian kementerian marines yaitu telah disusunnya Crash Program berupa Kegiatan Prioritas untuk 3 tahun kedepan (2022-2024) yang berisi kegiatan-kegiatan utama yang terukur dan diharapkan mampu menjadi pengungkit (me-leverage) kemajuan Industri Udang kita secara signifikan.





Hal ini tak luput dari faktor pendukung yaitu Pemerintah terus berupaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif, tata kelola perizinan dan permodalan yang efektif serta afirmasi kebijakan yang tepat di pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan terakhir antara time Kemenko Marves, KKP dan PUPR, diperoleh progres sebagai berikut:

- Timeline pekerjaan pembangunan fisik revitalisasi irigasi oleh PUPR ditargetkan pada kurun waktu 15 Juni 2023 – 31 Desember 2023. Hingga per tanggal 16 Oktober 2023, progresnya sudah mencapai 47%;
- Berdasarkan rencana pekerjaan, normalisasi yang akan dilaksanakan diantaranya :
 - Saluran primer sepanjang 8,36 Km;
 - Saluran Sekunder 7,8 Km;
 - Saluran Tersier 4,64 Km;

Berdasarkan ketiga data tersebut, maka ditargetkan total output pengerjaan mencapai 20 Km dengan total outcome estimasi mencapai 940 Ha;

- Merujuk pada DED yang telah disusun oleh KKP, maka pengerjaan fisik oleh PUPR pada tahun ini, cakupannya sebagai berikut :
 - Saluran primer sebesar 100%;
 - Saluran sekunder sebesar 39%;
 - Saluran tersier sebesar 11%;

PUPR menyampaikan komitmen bahwa pada tahun depan, akan dilakukan penganggaran kembali untuk menyelesaikan sisanya;

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, persoalan utama yang dihadapi terkait penyelesaian pengerjaan fisik ini yakni kondisi muara untuk dua saluran primer utama (Simpang Penawar dan Parit 9) merupakan kawasan hutan lindung. Disampaikan, bahwa pengerjaan area hulu hingga ke tengah tidak akan memberikan hasil maksimal terhadap perbaikan sirkulasi aliran air tambak jika area muara tidak dilakukan penanganan serupa;



Berdasarkan tinjauan lapangan ditemukan fakta lain, bahwa area muara yang terregister sebagai hutan lindung, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa hutan tersebut sudah tidak ada. Selain itu, berdasarkan laporan warga sekitar galian muara untuk saluran primer sudah lama dibentuk oleh masyarakat. Artinya, jika kedepan

pemerintah akan melakukan penggalian terhadap muara tersebut sifatnya bukan membuat galian baru melainkan perbaikan terhadap galian eksisting.

Berikut merupakan langkah tindak lanjut :

1. Addendum kontrak dan schedule
2. Melakukan Upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan menambah alat berat
3. Wilayah atau ruas jaringan yang berada di Kawasan Hutan Lindung tidak dikerjakan/ pindah lokasi


e. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Produk KP ke China

Pada bulan Juni 2020, General Administration of Customs of China (GACC) menolak impor produk perikanan Indonesia. Penolakan ini dilakukan karena ditemukan kontaminasi jejak COVID-19 pada produk-produk tersebut. Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi industri perikanan Indonesia. Pasalnya, China merupakan salah satu pasar ekspor terbesar bagi produk perikanan Indonesia. Pada tahun 2022, nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke China mencapai USD 1,2 miliar.

107 kasus temuan jejak covid-19 pada produk ekspor perikanan yang menyebabkan beberapa perusahaan ekspor perikanan tidak bisa meneruskan kegiatan ekspor ke RRT.


Melihat kondisi tersebut kemnko Marves terus berkoordinasi dengan KKP dan K/L guna mennelesaikan kasus tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

- Semenjak pertamakali Indonesia mendapatkan laporan suspend kemenko Marves langsung mengunjungi lokasi pertama kali perusahaan yang temotifikasi temuan jejak covid serta dan melakukan koordinasi dan kunjungan ke lokasi yang temotifikasi berikutnya.
- Pada tahun 2023 ini GACC mencabut penolakan impor produk perikanan Indonesia. Namun, GACC tetap memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan sistem biosekuriti di fasilitas-fasilitas produksi produk perikanan.

- 
- GACC mengeluarkan kebijakan baru per tanggal 8 januari 2023, tidak akan ada lagi kebijakan test/pemeriksaan covid-19 bagi produk, kemasan dalam ataupun luar, sampai dengan Sumber Daya Manusia yang bekerja di Industri tersebut. Menurut data BKIPM-KKP per Januari 2023 terdapat 521 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemegang ekspor produk perikanan RRT, yang sudah terdaftar ada 94 UPI berstatus approval, 177 UPI belum mendapatkan response, 161 tidak mendaftarkan CIFER, 51 UPI tidal data mengakses CIFER, 22 UPI sudah mendapatkan Respond GACC dan 16 UPI tidak bisa mendaftar langsung karena masih disuspend oleh GACC total 521 UPI yang lama dan ada 9 yang baru berstatus approved.
 - Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Kendala Ekspor ke RRT Pasca Kasus Penolakan Produk Perikanan Indonesia oleh GACC, di Bogor, pada tanggal 9 Februari 2023.
 - Rapat Koordinasi dalam rangka rangka penyelesaian kendala ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pasca kasus penolakan produk perikanan oleh Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok atau General Administration of Customs China (GACC) di Surabaya Pada Tanggal 27 Februari 2023 serta melakukan kunjungan lapangan di UPI yang tersuspend.
 - Rapat Koordinasi tentang Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan ke RRT Pasca Penolakan oleh GACC pada tanggal 21 September 2023 di Tangerang serta melakukan kunjungan lapangan di UPI yang tersuspend.
 - Rapat Koordinasi tentang Penyelesaian Kendala Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan ke RRT Pasca Penolakan oleh GACC pada tanggal 11 Oktober 2023 di Bali serta melakukan kunjungan lapangan di UPI yang tersuspend.
 - Selain itu, KKP juga bekerja sama dengan GACC untuk meningkatkan kerja sama teknis dalam bidang biosekuriti. Kerja sama ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penolakan impor produk perikanan Indonesia di masa yang akan datang.
 - Pada bulan September 2023, GACC mencabut penolakan impor produk perikanan Indonesia. Namun, GACC tetap memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan sistem biosekuriti di fasilitas- fasilitas produksi produk perikanan.


Adapun capaian/progress adalah sebagai berikut :

1. Sejak September 2020 hingga Januari 2023, terdapat kendala ekspor produk KP Indonesia oleh GACC terkait adanya temuan paparan covid 19 yakni sebanyak 107 kasus dari 60 UPI dan 10 provinsi. Melalui penyampaian GACC announcement nomor 131 Tahun 2022 terkait manajemen



karantina produk impor disampaikan bahwa GACC sejak 8 Januari 2023 tidak lagi memberlakukan pemeriksaan uji covid di pelabuhan penerima. Walaupun saat ini permasalahan temuan covid sudah tidak ada lagi namun terdapat permasalahan lainnya yakni sulitnya mendapatkan approval number baru dari GACC melalui aplikasi China Import Food Enterprises Registration (CIFER) terhadap sebanyak 521 UPI Indonesia pemegang China register;

2. Pusat Pengendalian Mutu, BP2MPHP telah mengumpulkan dokumen perbaikan dan telah menyampaikan kepada pihak GACC namun belum mendapatkan tanggapan balasan dikarenakan proses tersebut membutuhkan waktu lainnya. Berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, namun belum ada pencabutan status persyaratan wajib covid-19 oleh pihak GACC.
3. Rapat koordinasi ini melanjutkan upaya penyelesaian 13 UPI yang tersuspend oleh GACC yang sebelumnya sudah dilakukan rapat koordinasi di Tangerang pada tanggal 21 September 2023 untuk 8 UPI.
4. PT. Bintang Megah Jaya Perkasa ternotifikasi sejak 2021 dan telah melakukan perbaikan. Adapun feedback terakhir oleh GACC pada bulan April 2023 dan telah dilakukan perbaikan Kembali pada bulan Mei 2023. Oleh karena itu KKP akan melakukan Evaluasi terlebih dahulu dan hasilnya akan dikirimkan ke GACC pada minggu depan.
5. CV. Sinar Tirta ditemukan 13 point perbaikan dari hasil virtual inspection, dari 13 point tersebut telah dilakukan perbaikan dan KKP akan mengirimkan perbaikan tersebut pada minggu depan ke GACC.
6. PT. Starfood International pada tanggal 2 Desember 2020 dan pada tanggal 12 Mei 2021 dilakukan virtual inspection dengan 12 point perlu perbaikan. Telah mendapatkan feedback dan terakhir mengirimkan perbaikan pada tanggal 27 September 2023.
7. PT BaHari Biru Nusantara Pertama dapat notifikasi Mei 2021, bulan juni melakukan perbaikan 2021, kemudian mendapatkan informasi ada yang masih perlu ada perbaikan, pada januari 2022 kirim Kembali perbaikan namun belum dapat respon GACC.
8. PT. Sentral Benoa Utama telah mendapat 1 kali Virtual inspection dengan 11 point perlu perbaikan. UPI telah melakukan 3 kali pengiriman perbaikan, terakhir pengiriman perbaikan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan sampai sekarang belum ada respon.
9. Dari hasil kunjungan lapangan di PT. Sentral Benoa Utama, untuk mengatasi persoalan penolakan tersebut UPI tersebut membuat perusahaan baru yang lokasi berdekatan dengan UPI sebelumnya dengan nama PT. Sanjaya Sukses Maritime dan telah terdaftar pada aplikasi CIFER,



sehingga bisa melakukan ekspor ke RRT. Namun PT. Sentral Benoa Utama, berharap suspend tersebut bisa tetap dibuka sehingga hasil produksi dari PT. Sentra Benoa Utama juga bisa diekspor ke RRT.


10. Atase Perdagangan menayampikan bahwa telah berusaha untuk melakukan upaya pendekatan dengan GACC namun masih terkendala, karena GACC menjaga independensinya bahkan Waktu menko Marves berusaha untuk bertemu GACC tidak mau karena GACC hanya bersedia melakukan Komunikasi terkait penyelesaian ini dengan oteritas yang ditunjuk yaitu KKP.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Terus melakukan pendampingan pada UPI yang terdampak suspend dapat memenuhi persyaratan registrasi ulang, terus mencoba menyelesaikan satu demi satu masalah melalui high level dialogue menteri bersama pihak RRT untuk menengahi masalah ini, kalau memang diperlukan kita akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri agar tiap-tiap instansi mengumpulkan data detil terlebih dahulu untuk permasalahan-permasalahan yang ada.
- Sinergitas dalam intersepsi pasar perlu dilakukan baik dalam jangka waktu dekat, menengah dan panjang.
- Indonesia sebagai salah satu pemasok produk kelautan terbesar ke Chinadiharapkan dapat menggenjot ekspor produk kelautan dan perikanan ke China setelah pelarangan impor makanan laut asal Jepang.
- Dengan dicabutkan pemberlakuan test covid-19 pada produk kelautan perikan masuk ke china maka kasus temuan jejak covid-19 juga selesai namun dari kasus tersebut maka kita perlu meningkatkan system jaminan mutu produk kelautan dan Perikanan kita.

f. Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan OceanX diawali dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) Patnership in Marine Research, Technology and Capacity Building antara Kemenko Marves dengan OceanX, G42 dan G- Tech Digital Asia pada Bulan November 2022 dalam rangkaian pelaksanaan G20 di Bali. Langkah kongkrit dari LOI tersebut selanjutnya diimplementasikan pada tahun 2023. Kerja sama ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan akan dilaksanakan oleh para Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis yang tergabung dalam Tim Kerja Kemitraan yaitu TNI AL dalam



hal ini Pushidrosal, BRIN, Kementerian ESDM, BMKG, Kemendikbud, dan Bappenas. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

✓ ***Focus Group Discussion (FGD) Eksplorasi Laut***

Focus Group Discussion (FGD) Eksplorasi laut dalam dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 yang melibatkan pakar dari BRIN, KESDM, Pushidrosal, BMKG dan Bappenas. Kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi/bahan yang akan dijadikan sebagai tema dalam pelaksanaan kegiatan simposium/seminar/webinar dalam kerjasama Indonesia-OceanX. Selanjutnya kegiatan untuk memberikan informasi lebih terperinci tentang berbagai hal terkait laut dalam baik mengenai isu-isu potensial hingga yang masih menjadi tantangan dalam mendukung pembangunan sektor kelautan. Pelaksanaan riset laut dalam di Indonesia telah dilaksanakan oleh K/L yang memiliki keterkaitan dengan laut pelaksanaan tugas dan fungsi laut dalam. Kondisi terkini, pelaksanaan riset laut dalam belum optimal dikarenakan beberapa faktor keterbatasan seperti fasilitas dan peralatan riset, anggaran dan SDM. Pelaksanaan riset laut dalam perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia sehingga dapat mendukung pembangunan maritim Indonesia. Selanjutnya perlu mendorong sinergitas antar K/L dalam pelaksanaan riset terkait laut dalam serta perlunya mendorong perencanaan jangka panjang dan menengah terkait riset laut dalam di Indonesia

✓ ***Penandatanganan MoU Partnership in Marine Research and Technology, Public Awareness and Capacity Building***

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan OceanX dan G42 tentang Partnership in Marine Research and Technology, Public Awareness and Capacity Building dilaksanakan pada bulan 23 Juli 2023 di Bergen, Norwegia. Adapun kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan OceanX meliputi :

- perencanaan dan pelaksanaan penelitian bersama yang berfokus pada sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperoleh informasi/pengetahuan di ekosistem pesisir hingga laut dalam
- kesadaran publik, termasuk media pendidikan dan materi sosialisasi yang berupaya mengkomunikasikan kepada khalayak Indonesia, Asia dan global mengenai sejarah alam dan keanekaragaman sumber daya laut Indonesia
- pengembangan kapasitas di bidang kelestarian laut baik sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukungnya, termasuk namun tidak terbatas pada melalui program pelatihan analisis bersama dan beasiswa Kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani akan diimplementasikan pada tahun 2023 hingga 2024, dimana fokus kegiatan Tahun 2023 diantaranya:



✓ ***Young Explorer Program (YEP),***

kegiatan yang dilaksanakan oleh OceanX pada 4-13 September 2023 dengan rute Azores hingga ke Malta bertujuan untuk memperluas akses di bidang eksplorasi laut dan menumbuhkan ketertarikan generasi muda dalam mendukung keberlanjutan masa depan laut. Kegiatan ini juga sangat membantu mahasiswa ilmu kelautan dalam menyelesaikan bidang studinya;

✓ ***Lecture University Tour (LUT),***

pelaksanaan program melalui penyelenggaraan seminar di universitas terpilih yang ada di Indonesia dan menghadirkan pembicara Internasional di bidang riset kelautan, sains, teknologi dan media;

✓ ***United Arab Emirate (UAE) Mission***

ekspedisi bersama yang akan dilaksanakan pada Bulan November 2023 di perairan Laut Merah dengan mengirim perwakilan peneliti Indonesia untuk bergabung dalam ekspedisi tersebut;

✓ ***Conference of Parties (COP) 28***

perhelatan Konferensi Anggota Badan PBB ke28 yang akan dilaksanakan di Dubai pada bulan Desember 2023 menjadi peluang baik untuk Indonesia dalam memperkenalkan Sumber Daya Alamnya dan berkolaborasi dengan OceanX dan G42 dalam dukungan sains dan teknologi serta memperluas kerja sama di bidang Riset Kelautan dan peningkatan kapasitas di Indonesia

✓ ***Young Explorers Program-Indonesia Education Mission***

Sebagai tindak lanjut dari MoU, Pemerintah Indonesia mengirimkan peserta muda untuk mengikuti pelayaran dengan Kapal OceanXplorer dari Portugal ke Malta. Pelayaran tersebut guna memberikan pemahaman kepada peserta muda terkait teknologi riset kelautan yang dapat meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memahami potensi kelautan yang sebelumnya belum pernah diketahui dan didapatkan. Selanjutnya, informasi yang didapatkan menjadi dasar digunakan sebagai rekomendasi untuk melaksanakan joint research antara Pemerintah Indonesia dengan OceanX untuk mengidentifikasi potensi sumber daya laut Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8-17 September 2023. Kegiatan ini dilakukan di Kapal OceanXplorer yang berlayar dari Azores, Portugal menuju Valetta, Malta yang melibatkan 15 Peserta perwakilan Kemenko Marves, Kementerian PPN/Bappenas, BMKG, Pushidrosal, Universitas Wageningen, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Syiah Kuala dan Maritim Muda



✓ **University Lecture Tours**

Pelaksanaan program melalui penyelenggaraan seminar di universitas terpilih yang ada di Indonesia dan menghadirkan pembicara Internasional di bidang riset kelautan, sains, teknologi dan media. Kegiatan ULT dilaksanakan di Bandung pada tanggal 22 September dan Surabaya pada tanggal 25 September 2023

COP-26 UNITED NATION CLIMATE CHANGE CONFERENCE (UNFCCC), PAVILION INDONESIA DAN PAVILION OCEANX DAN INDONESIA NIGHT DI KAPAL OCEAN EXPLORER

Dubai – UAE, 28 November s.d 10 Desember 2023

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan OceanX terkait Eksplorasi Laut dalam akan terus dilaksanakan pada tahun 2024, walaupun terdapat beberapa kendala seperti belum optimalnya riset laut dalam, dikarenakan beberapa faktor keterbatasan seperti fasilitas dan peralatan riset, anggaran dan SDM. Namun hal ini tidak menghambat keberlanjutan kerjasama dengan OceanX dikarenakan faktor pendukung seperti kuatnya komitmen para stakeholder untuk tetap konsisten . Adapun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan riset bersama di perairan Indonesia sebagai tindak lanjut kerjasama Pemerintah Indonesia dengan OceanX di bidang laut dalam dengan memanfaatkan fasilitas kapal riset OceanXplorer
2. Pelaksanaan Young Explorer Program yang melibatkan lebih banyak pemuda Indonesia untuk terlibat dalam pelayaran menggunakan kapal OceanXplorer
3. Mendukung berbagai kegiatan terkait pengembangan kapasitas melalui kegiatan berbagi pengetahuan yang melibatkan ekspert ataupun melalui pembuatan media kreatif.

g. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20



Dengan memiliki lebih dari 17.500 pulau dan lebih dari 81.000 kilometer garis pantai, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, peristiwa cuaca yang lebih ekstrem, dan peningkatan keasaman air laut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin fokus pada *Blue economy*. *Blue economy* / Ekonomi biru merupakan alat yang cukup efektif bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan dan merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi Indonesia untuk Visi Indonesia 2045. *Blue economy* Indonesia mempunyai potensi untuk berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi iklim. Dapat terlihat bahwa pada akhir-akhir ini nilai laut berkurang karena dampak dari penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, polusi, hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, dan perkembangan perkotaan di pesisir pantai yang menjadi gejala lemahnya tata kelola laut.

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi pelaksanaan kerja sama Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20, pada Triwulan IV telah dicapai output antara adanya Term of Reference mengenai Global Ocean Governance Panel: Embodiment of Blue Economy through A Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment Indonesia Pavilion, COP-28 Dubai, United Arab Emirates 2023. Faktor yang mendukung dalam adanya TOR pada kegiatan COP28 tersebut adalah telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, OceanX, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta K/L lain yang ingin terlibat pada Paviliun Indonesia pada COP28 Dubai. Hal ini merupakan bentuk nyata dukungan dan komitmen pimpinan serta stakeholder terkait. Adapun untuk tindak lanjut adalah sebagai berikut :



h. Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit

Pada tahun 2022 terdapat kelangkaan minyak goreng secara nasional yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan tugas dari Presiden untuk memitigasi permasalahan tersebut. Untuk menjalankan

arahan dari Presiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit industri kelapa sawit.

Latar Belakang Pembentukan dan Sekilas tentang Satgas

Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam tata Kelola industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir

Hilangnya penerimaan negara baik berupa pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak atas kegiatan pemanfaatan lahan kelapa sawit yang tidak memiliki perizinan

Berdasarkan data perizinan lahan kelapa sawit di Indonesia, masih banyak lahan kelapa sawit yang belum memiliki izin lengkap yang terkait dengan pemanfaatan lahan kelapa sawit

SEKILAS TENTANG SATGAS

➔➔➔

A Satgas dibentuk untuk peningkatan tata Kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara

B Satgas bertugas untuk percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak

C Satgas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden hingga 30 September 2024 dengan periode pelaporan paling sedikit 1x setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan

D Biaya dalam pelaksanaan Satgas akan dibebankan pada APBN Kementerian/Lembaga dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2

Gambar 18 Latar Belakang dan Sekilas Tentang Satgas

Pada bulan Desember 2022, hasil audit BPKP menyatakan bahwa untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara sistematis, diperlukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Pada bulan April 2023, Presiden secara resmi membentuk Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas) melalui Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2023. Satgas tersebut terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana

Daftar Pengarah dan Pelaksana

Pengarah dan Pelaksana Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Tata Kelola Kelapa Sawit

Susunan Organisasi Pengarah

I. Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

II. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

III. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

IV. Anggota Pengarah:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Jaksa Agung
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
10. Kepala Badan Informasi Geospasial
11. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

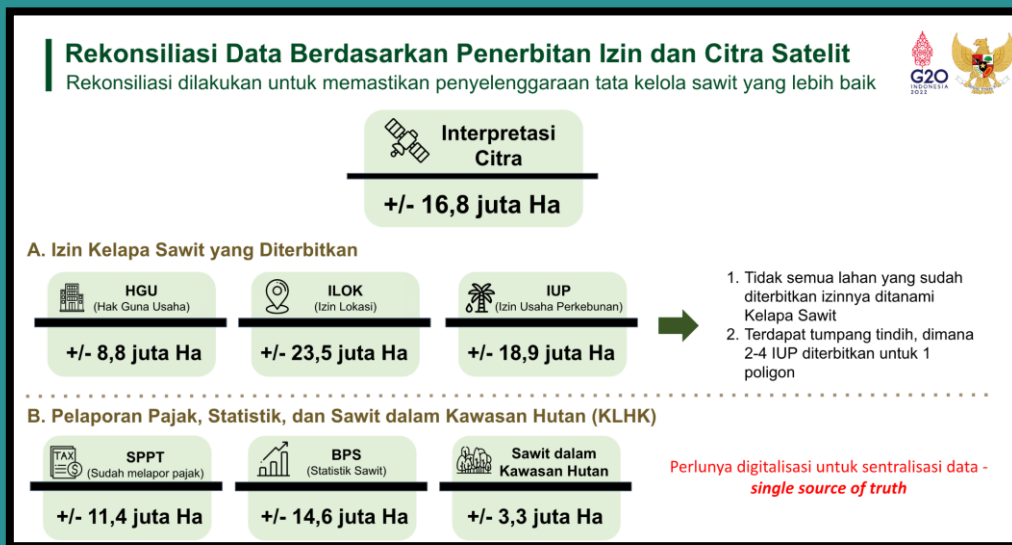
Susunan Organisasi Pelaksana

1. Ketua: Wakil Menteri Keuangan
2. Wakil Ketua I: Wakil Menteri ATR/BPN
3. Wakil Ketua II: Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Sekretaris I: Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Sekretaris II: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6. Anggota:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian
2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian
3. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Marves
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves
5. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenko Polhukam
6. Direktur Jenderal Pajak, Kemenkeu
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu
9. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian LHK
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK
12. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan, Kementerian LHK
13. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
14. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri
15. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
16. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN
17. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial
18. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
19. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet
20. Deputi Bidang Analisis Transaksi Keuangan, PPAK
21. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
22. Asisten Teritorial Panglima Tentara Nasional Indonesia
23. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
24. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Perekonomian
25. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kemenko Marves

Gambar 19 Daftar Pengarah dan Pelaksana Satgas

BPKP telah melakukan audit terhadap perizinan yang relevan terkait dengan industri kelapa sawit. Terdapat tiga perizinan yang relevan, antara lain: Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Hak Guna Usaha.



Gambar 20 Kondisi Perizinan, Pelaporan Pajak, Statistik, dan Sawit Dalam Kawasan Hutan

Adapun capaian sebagai berikut :

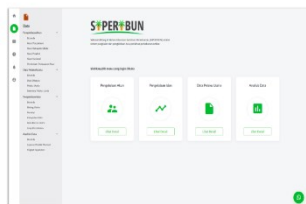
Untuk memperbaiki kondisi perizinan industri kelapa sawit, maka diperlukan data yang akurat dari masing-masing perusahaan. Penerbitan perizinan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Namun, data penerbitan saat ini tersebar di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sehingga Satgas memutuskan bahwa perlu dilakukan *Self Reporting* oleh Perusahaan. Adapun kegiatan *Self Reporting* sendiri bertujuan untuk pengumpulan data dan pengambilan kebijakan berdasarkan data yang terkumpul.

Setelah melakukan analisa, platform Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dapat digunakan sebagai pusat pengumpulan dari data-data yang dimiliki perusahaan

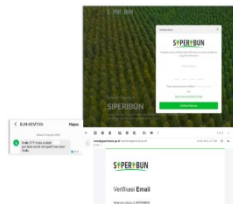
Penggunaan SIPERIBUN sebagai Platform Self Reporting

Kewajiban Self Reporting menggunakan Permentan

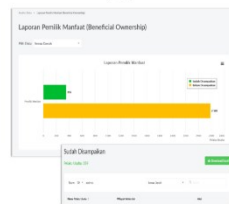
1. Tampilan Awal ketika Log In SIPERIBUN



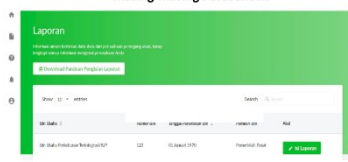
2. Keamanan menggunakan OTP



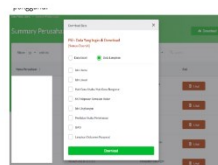
3. Monitoring Pengumpulan dokumen agregat



4. Laporan Pengumpulan dokumen masing-masing Perusahaan



5. Download dokumen pada SIPERIBUN



Gambar 22 Konferensi Pers Self Reporting

Berbagai sosialisasi telah dilakukan di beberapa Provinsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian/Lembaga lain sebagai anggota Satgas. Respon dari Perusahaan sangat baik dalam pelaporan melalui kegiatan *Self Reporting* ini.

Jumlah Luas Lahan Berdasarkan Perizinan Perusahaan yang Terdaftar di SIPERIBUN Meningkat, Tetapi Masih Ada Gap dengan Data Awal Satgas



Tindak Lanjut: Kementerian/Lembaga dengan perizinan terkait melakukan persandingan data dengan SIPERIBUN

4

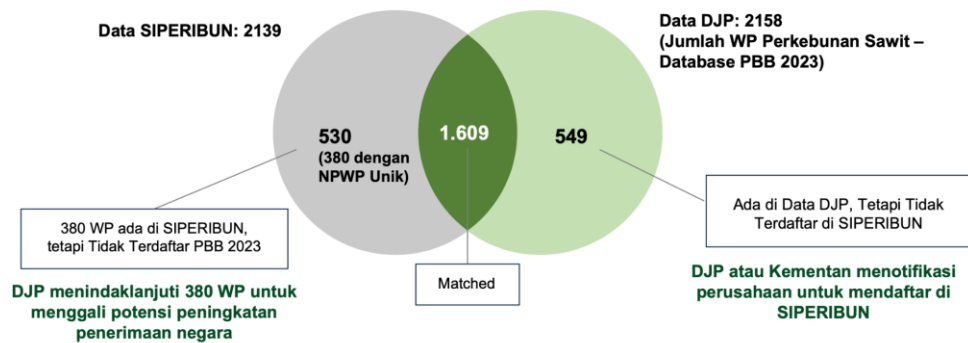
Gambar 23 Perizinan yang Terkumpul di SIPERIBUN

Self Reporting tersebut berdampak signifikan pada penerimaan negara. Untuk mengukur penerimaan negara, Kementerian/Lembaga terkait melakukan pemadanan data. Adapun hasil pemadanan data adalah sebagai berikut:

Hasil Persandingan Data SIPERIBUN dengan Data DJP



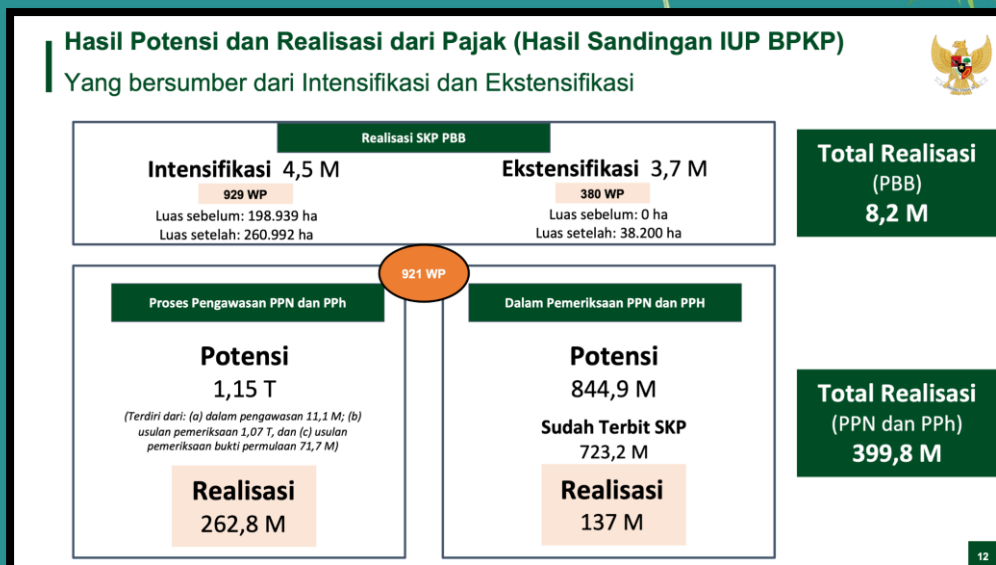
- Terdapat perusahaan terdaftar di DJP yang belum mendaftar SIPERIBUN.
- SIPERIBUN bisa memberikan tambahan data untuk potensi peningkatan penerimaan pajak



5

Gambar 24 Hasil Pemadanan Data SIPERIBUN dan DJP

Dari data tersebut, penerimaan negara yang berasal dari pajak juga mengalami peningkatan sebagai berikut:



Gambar 25 Hasil Peningkatan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pajak


Kementerian/Lembaga lainnya juga telah melakukan penyandingan data dengan hasil dari SIPERIBUN untuk upaya peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain hasil dari SIPERIBUN, Satgas memiliki pekerjaan prioritas lainnya. Utamanya pada penyelesaian administrasi sawit dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Pasal 110A pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Progress Pencapaian Lahan Sawit dalam Kawasan Hutan Hingga 2 November 2023

	SK Datin 1 - 15	SK Datin 16 - 18	Perubahan
Jumlah Subjek Hukum	3.687	5.096	+1.409
Jumlah Perkebunan Sawit (Luas Indikatif)	1.679 (± 1,68 juta ha)	2.887 (± 2,45 juta ha)	+1.208 ↑ (±776.467 ha)
Jumlah Perusahaan (Luas Indikatif)	1.263 (± 1,47 juta ha)	2.128 (± 2,17 juta ha)	+865 ↑ (±701.559,88 ha)

Daftar final perusahaan yang tidak kena 10x PNBP jika diidentifikasi masuk dalam 110A

Gambar 26 Sebanyak 2.128 Perusahaan telah Terdaftar pada SK Datin



Dari 2.128 perusahaan ini, akan ditindak lanjuti sesuai dengan SK 861 dan SK 661 yang telah diterbitkan oleh Menteri LHK.

Namun Satgas Sawit dalam upaya peningkatan tata kelola industri perkebunan kelapa sawit menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- ✓ Belum adanya sistem informasi yang digunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ATR/BPN untuk mengintegrasikan data secara realtime dan otomatis. Penarikan dan pengolahan data perizinan perusahaan masih dilakukan secara manual melalui aplikasi sederhana Google Spreadsheet. Proses tersebut memakan waktu yang lama, karena Satgas Sawit harus meneliti satu per satu data perizinan perusahaan yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga agar dapat terintegrasi secara optimal.
- ✓ Proses pengumpulan persyaratan administratif perusahaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan Pasal 110A masih dilakukan secara manual. Perusahaan satu per satu menyampaikan persyaratan administratif Pasal 110A UUCK secara langsung ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mekanisme ini memakan waktu yang lama sebab perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup banyak dan kompleks.

Upaya yang dilakukan Satgas Sawit untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan tata kelola industri perkebunan kelapa sawit, antara lain:

- ✓ Penggunaan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) milik Kementerian Pertanian untuk pengumpulan data perizinan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan realisasi kebun kelapa sawit. Perusahaan melaporkan secara mandiri data-data perizinan perkebunan kelapa sawit antara lain: Identitas Perusahaan, ILOK, IUP, HGU, Citra Satelit Kebun Kelapa Sawit, dan lain-lain melalui SIPERIBUN. Keamanan aplikasi SIPERIBUN telah memenuhi uji keamanan IP Security Assesment oleh BSSN dan terdapat fitur keamanan akun menggunakan metode OTP standar dari BSSN. Selain itu, demi keamanan penggunaan akun SIPERIBUN pada saat pertama kali melakukan pendaftaran akun perusahaan wajib menyertakan KTP dan Surat Kuasa bagi user/person in charge yang bertanggung jawab terhadap masing-masing akun perusahaan.
- ✓ Guna mempermudah proses pengumpulan persyaratan administratif Pasal 110A UUCK, Satgas Sawit menggelar kegiatan Coaching Clinic di beberapa Provinsi besar di Indonesia








seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi DKI Jakarta sehingga seluruh subyek hukum atau perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat secara langsung berkonsultasi dan menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi terkait kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya lain juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, yakni melaksanakan Kerja Sama dengan PT Telkom Indonesia dalam penyediaan sistem permohonan keberatan atas keputusan penetapan penyelesaian mekanisme Pasal 110A atau Pasal 110B UUCK.

Bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Satgas Sawit pada Tahun 2024 dalam upaya peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara, antara lain:

- 1) Kementerian/Lembaga memiliki Single Source Of Truth data sawit rakyat
- 2) Pendataan Hak Guna Usaa (HGU) dan Kawasan Hutan secara spasial
- 3) Perbaiki regulasi sehingga tidak tumpang tindih terhadap Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM)
- 4) Meningkatkan realisasi peremajaan sawit rakyat
- 5) Mewujudkan digitalisasi tata kelola industri kelapa sawit

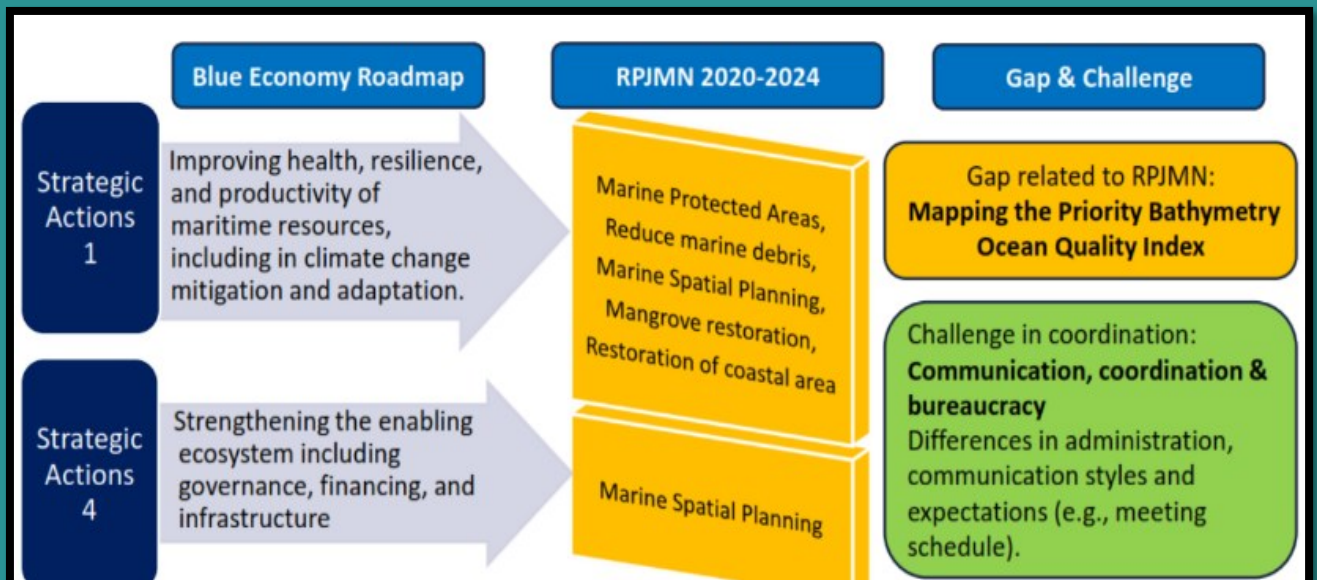
i. Koordinasi Pelaksanaan National Blue Agenda Action Partnership (NBAAP)

Kontribusi NBAAP pada RPJMN 2020-2024 tergambar pada gambar indikator dibawah ini:

RPJMN Indicator	Baseline 2019	Target 2023	Target 2024	NBAAP Program
 Marine/open water conservation area (million ha)	22.7	29.1	26.9 to revise	13
 Finalizing marine spatial planning and coastal zoning	24 RZ	32 RZ	102 RZ cumulative	1
 Mapping the priority bathymetry on a scale of 1:50,000 (km2)	5,689	N/A	50,000	0
 Ocean Quality Index	N/A	59.5 (2022)	60.5	0
 Restoration of damage in coastal areas and small islands (location)	17	62	26	6
 Restoration of mangrove and coastal ecosystems (ha)	1,000	11,250 (2022)	50,000	12
 Target to reduce marine debris (percentage)	N/A	40	60	14

SUPD I MoHA, Dit KKHL MMAF, ADB, AFD, Australia, Canada, Germany, Norway, USAID, World Bank, KFW, MTCRC, FAO, UNDP, UNEP, UNESCO.

2. Beberapa pertemuan Task Force Blue Health yang telah dilaksanakan dari awal launching pada 14 November 2022 antara 1st TF Meeting pada 27 Februari 2023; 2nd TF Meeting pada 2 March 2023, 3rd TF Meeting pada 11 Mei 2023 dan Blue Health Forum pada 26-29 Oktober 2023.
3. Berdasarkan 48 Program/Project tersebut terdiri atas isu Marine/Open Water Conservation Area; Marine Spatial Planning, Restoration of Coastal Areas, Mangrove Ecosystem Restoration dan Reduce Marine Debris.
4. Berdasarkan Rencana Aksi Strategis: 2023-2024 Memperkuat Konsolidasi Ekosistem Ekonomi Biru melalui Konsolidasi pencapaian target pengembangan Blue Health tahun 2020-2024 di bawah NBAAP sesuai gambar di bawah ini.



Rekomendasi dan tindak lanjut:

1. Blue Health Task Force workplan kedepan antara lain:
 - ✓ Mengumpulkan masukan melalui pembagian dan inventarisasi draf analisis dokumen di antara anggota
 - ✓ Pertemuan Koordinasi untuk mengintarisasi hasil analisis dan mengidentifikasi aktivitas kolaborasi
 - ✓ Pertemuan Koordinasi berupa kunjungan lapangan atau kegiatan lainnya

2. Diperlukan manajemen dan penentuan waktu yang baik
3. Kemungkinan Roadmap Ekonomi Biru Indonesia dan pengembangan RPJMN 2025- 2029 dimasukkan dalam timeline Blue Health.
4. Beberapa contoh lesson learned program Blue Health untuk tahun 2024 antara lain:
 - ✓ penyelesaian Konflik kepentingan yang tinggi di bidang kelautan dan penggunaan pesisir, jadi penting untuk dilakukan melibatkan pemangku kepentingan dari mulai termasuk lokal Masyarakat.

3.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien

IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
SAKIP	76	75.8	99.74%	0.3	0.1666667	0.16622807	Intermediate outcome

5. Indikator Kinerja 5 adalah “Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”

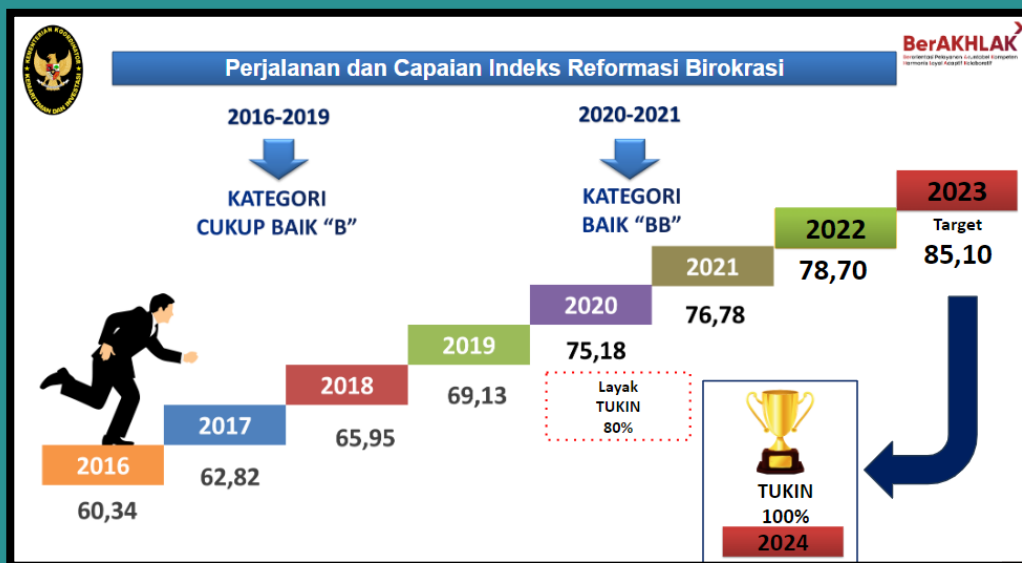
Dalam mencapai Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, yang ditargetkan pada Triwulan IV Tahun 2023, penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. 4 komponen tersebut dengan total bobot 100%. Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hasil evaluasi kinerja yaitu 75,80 atau tingkat akuntabilitas kinerja BB “Sangat Baik”. Berikut merupakan tabell hasil penilaian evaluasi AKIP sebagai berikut:

No.	Komponen	Evaluasi SAKIP 2023	
		Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	25	21,50
4.	Evaluasi Internal	15	9,60
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

6. Indikator Kinerja 6 adalah “Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) Pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”

IKU	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Bobot	Koefisien Bobot IKU	Capaian IKU	Keterangan
PMRB	90%	90%	100.00%	0.3	0.1666667	0.1666667	Intermediate outcome

berikut terlampir capaian hasil indeks RB tahun 2023



Penilaian	Bobot	Range Nilai	SKOR	NILAI	PIC	E. MESO
RB Tematik	10,00					
A. Capaian Utama RB Tematik						
1. Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100	75,00	1,50	Kedeputian	Kemenpan-RB
2. Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100	75,00	1,50	Kedeputian	Kemenpan-RB
3. Peningkatan Investasi	2,00	0-100	75,00	1,50	Kedeputian	Kemenpan-RB
4. Pengendalian Inflasi	2,00	0-100	75,00	1,50	Kedeputian	Kemenpan-RB
5. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100	75,00	1,50	Kedeputian	Kemenpan-RB
TOTAL RB TEMATIK				7,50		
TOTAL NILAI RB	110,00			86,66		

3.2. Realisasi Anggaran

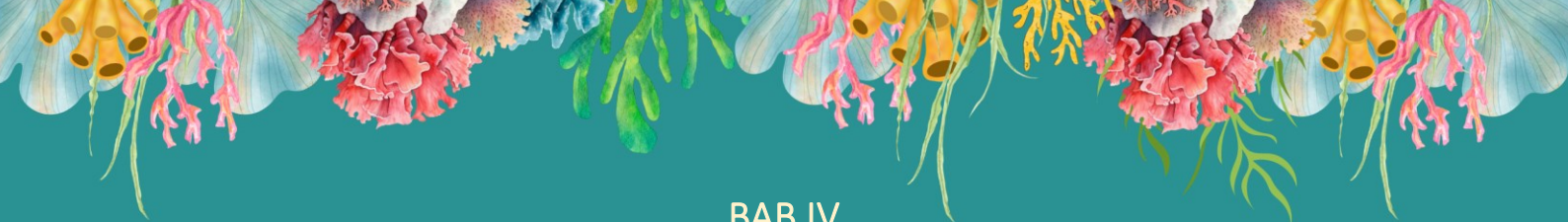
Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 15.859.820.000,-.

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	15,859,820,000	15,852,885,092	6,934,908	99.96
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Non ABT)	14,499,850,000	14,494,087,808	5,762,192	99.96
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	2,050,000,000	2,049,858,216	141,784	99.99
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,140,000,000	2,139,795,188	204,812	99.99
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	2,140,000,000	2,137,387,655	2,612,345	99.88
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	1,900,000,000	1,897,870,720	2,129,280	99.89
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1,900,000,000	1,899,800,339	199,661	99.99
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Sumber Daya Maritim	2,319,850,000	2,319,773,554	76,446	100.00
ABT SAWIT	1,359,970,000	1,358,797,284	1,172,716	99.91
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2,050,000,000	2,049,602,136	397,864	99.98

Capaian realisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp. **15,852,885,092** atau **99.96%** dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut:

IKU	PAGU	REALISASI	SISA	%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	15,859,820,000	15,852,885,092	6,858,462	99.96
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	13,809,820,000	13,803,282,956	6,460,598	99.95
Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	2,050,000,000	2,049,858,216	141,784	99.99
Pengendalian Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	445,679,000	445,673,714	5,286	100.00
Pengendalian Kebijakan Perencanaan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	455,998,000	455,872,703	125,297	99.97
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)	666,665,000	666,659,300	5,700	100.00
Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut	481,658,000	481,652,499	5,501	100.00
Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2,140,000,000	2,139,795,188	204,812	99.99
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perikanan Tangkap	443,647,000	443,643,767	3,233	100.00
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	932,295,000	932,106,855	188,145	99.98

Pengendalian Kebijakan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap	764,058,000	764,044,566	13,434	100.00
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya	2,140,000,000	2,137,387,655	2,612,345	99.88
Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	538,187,000	537,831,610	355,390	99.93
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	749,473,000	748,495,562	977,438	99.87
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	852,340,000	851,060,483	1,279,517	99.85
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing	1,900,000,000	1,897,870,720	2,129,280	99.89
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	406,670,000	406,541,676	128,324	99.97
Pengendalian Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	545,267,000	543,394,499	1,872,501	99.66
Pengendalian Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	948,063,000	947,934,545	128,455	99.99
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1,900,000,000	1,899,800,339	199,661	99.99
Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman	832,340,000	832,302,189	37,811	100.00
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	602,345,000	602,275,806	69,194	99.99
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset dan Inovasi dalam Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim	465,315,000	465,222,344	92,656	99.98
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Sumber Daya Maritim	2,319,850,000	2,319,773,554	76,446	100.00
ABT SAWIT	1,359,970,000	1,358,797,284	1,172,716	99.91
5601 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2,050,000,000	2,049,602,136	397,864	99.98
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	331,860,000	331,745,986	114,014	99.97
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	694,660,000	694,503,207	156,793	99.98
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	274,495,000	274,417,776	77,224	99.97
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	685,426,000	685,385,653	40,347	99.99
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	63,559,000	63,549,514	9,486	99.99



BAB IV PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV Tahun 2023 ini merupakan program yang disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, dan perjanjian kinerja. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target dari apa yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK). Tercapainya target pada tiap kegiatan tidak berarti tanpa masalah dan kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melakukan tugas dan fungsi sesuai fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian pada Kementerian/ Lembaga dan *stakeholders* yang menjadi mitra dalam rangka tercapainya fungsi kelembagaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan/program yang telah terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2023, maka perlu adanya dorongan percepatan dan peningkatan kinerja dalam rangka mempercepat kebijakan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait. Selain kerja sama dengan pihak eksternal, penting juga adanya peningkatan kerja sama internal untuk mewujudkan sinergisitas yang lebih baik lagi di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.